NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	PAGU	PAGU VALIDASI	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
1	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.4.01,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	684000000	684000000	684000000	Infrastruktur dan Sanitasi
2	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1000000000	1000000000	1000000000	Infrastruktur dan Sanitasi
3	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.4.01,2.2.01.08.02.0004,2.2.01.09.01.0003	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD,DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	12847029000	12847029000	12847029000	Infrastruktur dan Sanitasi
4	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.4.01,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1484000000	1484000000	1484000000	Infrastruktur dan Sanitasi
5	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	800000000	800000000	800000000	Infrastruktur dan Sanitasi
6	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.4.01,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2031306879	2031306879	2031306879	Infrastruktur dan Sanitasi
7	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	1.4.01,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2500000000	2500000000	2500000000	Infrastruktur dan Sanitasi
8	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	728886578	728886578	728886578	Infrastruktur dan Sanitasi
9	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	5898962400	5898962400	5898962400	Infrastruktur dan Sanitasi
10	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	553275280	553275280	553275280	Infrastruktur dan Sanitasi
11	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.4.01,1.2.01.08,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	675001340	675001340	675001340	Infrastruktur dan Sanitasi
12	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.2.01.08.02.0004,2.2.01.09.02.0001,2.2.01.09.02.0003	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik-BOS Reguler,DAK Non Fisik-BOS Kinerja	60549164831	60549164831	60549164831	Infrastruktur dan Sanitasi
13	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.4.01,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	777251380	777251380	777251380	Infrastruktur dan Sanitasi
14	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	880000000	880000000	880000000	Infrastruktur dan Sanitasi
15	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1061144650	1061144650	1061144650	Infrastruktur dan Sanitasi
16	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150000000	150000000	150000000	Infrastruktur dan Sanitasi
17	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.4.01,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	6813075757	6813075757	6813075757	Infrastruktur dan Sanitasi
18	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0	0		
19	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	651676510	651676510	651676510	Infrastruktur dan Sanitasi
20	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.4.01,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	7382400000	7382400000	7382400000	Infrastruktur dan Sanitasi
21	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	600000000	600000000	600000000	Infrastruktur dan Sanitasi
22	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2100000000	2100000000	2100000000	Infrastruktur dan Sanitasi
23	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200000000	200000000	200000000	Infrastruktur dan Sanitasi
24	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.4.01,2.2.01.08.02.0004,2.2.01.09.01.0003	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6070441000	6070441000	6070441000	Infrastruktur dan Sanitasi
25	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.4.01,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2320000000	2320000000	2320000000	Infrastruktur dan Sanitasi
26	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	550000000	550000000	550000000	Infrastruktur dan Sanitasi
27	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	556999162	556999162	556999162	Infrastruktur dan Sanitasi
28	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	289725860	289725860	289725860	Infrastruktur dan Sanitasi
29	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.4.01,1.2.01.08,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	529452050	529452050	529452050	Infrastruktur dan Sanitasi
30	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.2.01.09.02.0001,2.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Reguler,DAK Non Fisik-BOS Kinerja	29337381169	29337381169	29337381169	Infrastruktur dan Sanitasi
31	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	215028730	215028730	215028730	Infrastruktur dan Sanitasi
32	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.4.01,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1592000000	1592000000	1592000000	Infrastruktur dan Sanitasi
33	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.4.01,2.2.01.08.02.0004,2.2.01.09.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3194044466	3194044466	3194044466	Infrastruktur dan Sanitasi
34	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	203797900	203797900	203797900	Infrastruktur dan Sanitasi
35	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	556953750	556953750	556953750	Infrastruktur dan Sanitasi
36	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.2.01.09.02.0007,2.2.01.09.02.0028,2.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-BOP PAUD,DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler,DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	4655316000	4655316000	4655316000	Infrastruktur dan Sanitasi
37	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	236332500	236332500	236332500	Infrastruktur dan Sanitasi
38	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.2.01.09.02.0008,2.2.01.09.02.0030,2.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan,DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler,DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	2223450000	2223450000	2223450000	Infrastruktur dan Sanitasi
39	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	74280000	74280000	74280000	Infrastruktur dan Sanitasi
40	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik

45	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyuliran/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30000000	30000000	30000000	
46	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20780000	20780000	20780000	
47	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
48	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15013416	15013416	15013416	
49	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15640000	15640000	15640000	
50	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20024400	20024400	20024400	
51	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13000000	13000000	13000000	
52	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15553400	15553400	15553400	
53	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20021000	20021000	20021000	
54	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10069450	10069450	10069450	
55	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	62160000	62160000	62160000	
56	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
57	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	145000000	145000000	145000000	
58	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	60000000	60000000	60000000	
59	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10030000	10030000	10030000	
60	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	434999580	434999580	434999580	Infrastruktur dan Sanitasi
61	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.4.01.1.2.01.08,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1000008120	1000008120	1000008120	Infrastruktur dan Sanitasi
62	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	17190000	17190000	17190000	Infrastruktur dan Sanitasi
63	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	1.4.01.2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	202159300	202159300	202159300	Infrastruktur dan Sanitasi
64	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	68848000	68848000	68848000	Infrastruktur dan Sanitasi
65	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	2.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	8000000	8000000	8000000	Infrastruktur dan Sanitasi
66	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	2.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2500000000	2500000000	2500000000	
67	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	361390000	361390000	361390000	Infrastruktur dan Sanitasi
68	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.2.01.08,2.2.02.01.01.0005	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	400000000	400000000	400000000	Infrastruktur dan Sanitasi
69	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0025	Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	400000000	400000000	400000000	
70	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.4.01,1.4.01.08,2.2.01.08.02.0005,2.2.02.01.01.0005	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Sisa Belanja Lainnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	950000000	950000000	950000000	Infrastruktur dan Sanitasi
71	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.2.01.08,2.2.01.09.01.0060	Dana Alokasi Umum (DAU),DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	973940000	973940000	973940000	Infrastruktur dan Sanitasi
72	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	206522275	206522275	206522275	Infrastruktur dan Sanitasi
73	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0	0	0	
74	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1570000000	1570000000	1570000000	Infrastruktur dan Sanitasi
75	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0025	Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0	0	0	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
76	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0022	Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0	0	0	
77	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0023	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	480000000	480000000	480000000	
78	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	153171000	153171000	153171000	Infrastruktur dan Sanitasi
79	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,_ Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.4.01,2.2.01.07.01.0004,2.2.01.08.02.0005,2.2.01.09.02.0033	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	10232179593	10232179593	10232179593	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
80	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0022	Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,_ Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0	0	0	
81	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0023	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,_ Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1039231200	1039231200	1039231200	
82	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0025	Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,_ Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.1.02.01,1.4.01,2.2.01.08.02.0005	Retribusi Jasa Umum,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	800000000	800000000	800000000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
83	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0026	Rumah Sakit Umum Daerah Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,_ Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	800000000	800000000

89	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	201819000	201819000	201819000		
90	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	43950000	43950000	43950000		
91	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	120320000	120320000	120320000		
92	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0033,2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	136280000	136280000	136280000		
93	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21280000	21280000	21280000		
94	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	118800000	118800000	118800000		
95	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	28800000	28800000	28800000		
96	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	136068000	136068000	136068000		
97	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	68630000	68630000	68630000		
98	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	108110000	108110000	108110000		
99	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	50880000	50880000	50880000		
100	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	45220000	45220000	45220000		
101	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	78540000	78540000	78540000		
102	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	100450000	100450000	100450000		
103	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	141657000	141657000	141657000		
104	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	238219000	238219000	238219000		
105	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	221180000	221180000	221180000		
106	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	71000000	71000000	71000000		
107	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.4.01,2.2.01.09.02.0033	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8000000	8000000	8000000		
108	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6000000	6000000	6000000	PEMENUHAN SPM	
109	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	109980000	109980000	109980000		
110	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	95625000	95625000	95625000		
111	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Nanga Tebidah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	171420000	171420000	171420000		
112	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	79140000	79140000	79140000		
113	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	83160000	83160000	83160000		
114	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	69390000	69390000	69390000		
115	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0033,2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	269500000	269500000	269500000		
116	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	28293000	28293000	28293000		
117	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	78740000	78740000	78740000		
118	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1875000	1875000	1875000		
119	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18240000	18240000	18240000		
120	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	37503000	37503000	37503000		
121	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	65399000	65399000	65399000		
122	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	79740000	79740000	79740000		
123	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	34200000	34200000	34200000		
124	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	50920000	50920000	50920000		
125	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	54960000	54960000	54960000		
126	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	46400000	46400000	46400000		
127	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	59880000	59880000	59880000		
128	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.2

130	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6000000	6000000	6000000	PEMENUHAN SPM
131	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	31353000	31353000	31353000	
132	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6000000	6000000	6000000	PEMENUHAN SPM
133	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7000000	7000000	7000000	
134	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	30460000	30460000	30460000	
135	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	74540000	74540000	74540000	
136	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Nanga Tebidah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	115355000	115355000	115355000	
137	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	82780000	82780000	82780000	
138	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	55860000	55860000	55860000	
139	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22240000	22240000	22240000	
140	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0033,2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	52780000	52780000	52780000	
141	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9300000	9300000	9300000	
142	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	26040000	26040000	26040000	
143	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	450000	450000	450000	
144	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	50520000	50520000	50520000	
145	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	35640000	35640000	35640000	
146	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	69255000	69255000	69255000	
147	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22180000	22180000	22180000	
148	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11400000	11400000	11400000	
149	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	44340000	44340000	44340000	
150	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	54960000	54960000	54960000	
151	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	32940000	32940000	32940000	
152	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	89820000	89820000	89820000	
153	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	77040000	77040000	77040000	
154	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6000000	6000000	6000000	PEMENUHAN SPM
155	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.4.01,2.2.01.09.02.0033	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7000000	7000000	7000000	
156	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	28894000	28894000	28894000	
157	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	23220000	23220000	23220000	
158	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Nanga Tebidah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14730000	14730000	14730000	
159	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	26380000	26380000	26380000	
160	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8510000	8510000	8510000	
161	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5571000	5571000	5571000	
162	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0033,2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7785000	7785000	7785000	
163	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6315000	6315000	6315000	
164	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2280000	2280000	2280000	
165	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3750000	3750000	3750000	
166	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5310000	5310000	5310000	
167	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7560000	7560000	7560000	
168	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10681000	10681000	10681000	
169	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEH

171	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7940000	7940000	7940000	
172	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	41223000	41223000	41223000	
173	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4115000	4115000	4115000	
174	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	37650000	37650000	37650000	
175	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	24390000	24390000	24390000	
176	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6000000	6000000	6000000	PEMENUHAN SPM
177	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.4.01,2.2.01.09.02.0033	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	10000000	10000000	10000000	PENURUNAN STUNTING
178	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	480866500	480866500	480866500	
179	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	460932000	460932000	460932000	
180	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Nanga Tebidah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	294271000	294271000	294271000	
181	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	603177000	603177000	603177000	
182	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	329631000	329631000	329631000	
183	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	278060000	278060000	278060000	
184	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0033,2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	353696000	353696000	353696000	
185	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	59880000	59880000	59880000	
186	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	370341000	370341000	370341000	
187	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	81129000	81129000	81129000	
188	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	358812000	358812000	358812000	
189	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	237096000	237096000	237096000	
190	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	405792000	405792000	405792000	
191	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	133498000	133498000	133498000	
192	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	174839000	174839000	174839000	
193	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	194771000	194771000	194771000	
194	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	466191000	466191000	466191000	
195	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	223768000	223768000	223768000	
196	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	469046000	469046000	469046000	
197	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	500632000	500632000	500632000	
198	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	25933000	25933000	25933000	
199	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3000000	3000000	3000000	
200	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2250000	2250000	2250000	
201	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	750000	750000	750000	
202	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.4.01,2.2.01.09.02.0033	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	350000000	350000000	350000000	
203	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17100000	17100000	17100000	
204	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13655000	13655000	13655000	
205	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20985000	20985000	20985000	
206	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9785000	9785000	9785000	
207	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8025000	8025000	8025000	
208	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20210000	20210000	20210000	
209	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18840000	18840000	18840000	
210	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13430000	13430000	13430000	
211	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN

212	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11230000	11230000	11230000	
213	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11070000	11070000	11070000	
214	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5858000	5858000	5858000	
215	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20350000	20350000	20350000	
216	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3255000	3255000	3255000	
217	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3970000	3970000	3970000	
218	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	26780000	26780000	26780000	
219	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18840000	18840000	18840000	
220	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8239000	8239000	8239000	
221	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12205000	12205000	12205000	
222	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.4.01,1.2.01.08,2.2.01.09.02.0033	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	276597000	276597000	276597000	
223	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.4.01,2.2.01.09.02.0033	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	168526000	168526000	168526000	
224	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	123330000	123330000	123330000	
225	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	92715000	92715000	92715000	
226	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Nanga Tebidah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15295000	15295000	15295000	
227	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	52760000	52760000	52760000	
228	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	29675000	29675000	29675000	
229	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10020000	10020000	10020000	
230	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0033,2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11758000	11758000	11758000	
231	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15430000	15430000	15430000	
232	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7410000	7410000	7410000	
233	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13140000	13140000	13140000	
234	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18698000	18698000	18698000	
235	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18458000	18458000	18458000	
236	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13227000	13227000	13227000	
237	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10715000	10715000	10715000	
238	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5294000	5294000	5294000	
239	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13350000	13350000	13350000	
240	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	37290000	37290000	37290000	
241	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9250000	9250000	9250000	
242	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15285000	15285000	15285000	
243	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21070000	21070000	21070000	
244	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6560000	6560000	6560000	
245	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17280000	17280000	17280000	
246	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	450000	450000	450000	
247	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19260000	19260000	19260000	
248	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	54060000	54060000	54060000	
249	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0	0	0	
250	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
251	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.4.01,2.2.01.09.02.0033	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	527141000	527141000	527141000	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM

252	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	59281000	59281000	59281000	
253	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	253516000	253516000	253516000	
254	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Nanga Tebidah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22980000	22980000	22980000	
255	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	260088000	260088000	260088000	
256	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	52515000	52515000	52515000	
257	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	73450000	73450000	73450000	
258	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	151817000	151817000	151817000	
259	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	55780000	55780000	55780000	
260	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	59180000	59180000	59180000	
261	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17820000	17820000	17820000	
262	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	28795000	28795000	28795000	
263	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	57585000	57585000	57585000	
264	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	75586000	75586000	75586000	
265	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	85338000	85338000	85338000	
266	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	25870000	25870000	25870000	
267	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	45215000	45215000	45215000	
268	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	56050000	56050000	56050000	
269	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	23694000	23694000	23694000	
270	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	91585000	91585000	91585000	
271	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	109244000	109244000	109244000	
272	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1080000000	1080000000	1080000000	
273	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.4.01,2.2.01.08.02.0005,2.2.02.01.01.0005	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bokok	21585597600	21585597600	21585597600	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
274	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	41690000	41690000	41690000	Infrastruktur dan Sanitasi
275	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0022	Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
276	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0025	Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.1.02.01,1.4.01,1.2.01.08,2.2.01.08.02.0005	Retribusi Jasa Umum,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3546717200	3546717200	3546717200	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
277	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0026	Rumah Sakit Umum Daerah Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.4.01,2.2.01.08.02.0005	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	890161160	890161160	890161160	Infrastruktur dan Sanitasi
278	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	301151000	301151000	301151000	Infrastruktur dan Sanitasi
279	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	296254000	296254000	296254000	Infrastruktur dan Sanitasi
280	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Nanga Tebidah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	322306000	322306000	322306000	Infrastruktur dan Sanitasi
281	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	315236000	315236000	315236000	Infrastruktur dan Sanitasi
282	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	236243000	236243000	236243000	Infrastruktur dan Sanitasi
283	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	237079000	237079000	237079000	Infrastruktur dan Sanitasi
284	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	443780000	443780000	443780000	Infrastruktur dan Sanitasi
285	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	205120000	205120000	205120000	Infrastruktur dan Sanitasi
286	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	254815000	254815000	254815000	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
287	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	85523000	85523000	85523000	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
288	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	220734000	220734000	220734000	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
289	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	140155000	140155000	140155000	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
290	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	191946000	191946000	191946000	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
291	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJI

292	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	146120000	146120000	146120000	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
293	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	132791000	132791000	132791000	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
294	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	314352000	314352000	314352000	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
295	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	193188000	193188000	193188000	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
296	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	364181000	364181000	364181000	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
297	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	374004000	374004000	374004000	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
298	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.2.01.08,2.2.01.09.02.0033	Dana Alokasi Umum (DAU),DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	229917500	229917500	229917500	
299	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0023	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20450000	20450000	20450000	
300	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9270000	9270000	9270000	
301	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9224000	9224000	9224000	
302	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.2.01.08,2.2.02.01.01.0005	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1406730000	1406730000	1406730000	
303	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0	0	0	
304	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26424000	26424000	26424000	Infrastruktur dan Sanitasi
305	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0	0	0	
306	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2700000	2700000	2700000	Infrastruktur dan Sanitasi
307	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	57250000	57250000	57250000	
308	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	40360000	40360000	40360000	
309	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17031000	17031000	17031000	
310	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16527000	16527000	16527000	
311	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0033,2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	51655000	51655000	51655000	
312	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6920000	6920000	6920000	
313	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	40703000	40703000	40703000	
314	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8500000	8500000	8500000	
315	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	53000000	53000000	53000000	
316	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11830000	11830000	11830000	
317	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10212000	10212000	10212000	
318	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14160000	14160000	14160000	
319	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	47400000	47400000	47400000	
320	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10940000	10940000	10940000	
321	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12215000	12215000	12215000	
322	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	40460000	40460000	40460000	
323	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	89820000	89820000	89820000	
324	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	80525000	80525000	80525000	
325	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	504440000	504440000	504440000	
326	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	25230000	25230000	25230000	
327	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17270000	17270000	17270000	
328	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Nanga Tebidah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5616500	5616500	5616500	
329	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13190000	13190000	13190000	
330	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4255000	4255000	4255000	
331	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk U

333	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1440000	1440000	1440000	
334	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	150000	150000	150000	
335	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3300000	3300000	3300000	
336	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2430000	2430000	2430000	
337	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8678000	8678000	8678000	
338	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2612000	2612000	2612000	
339	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1900000	1900000	1900000	
340	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7855000	7855000	7855000	
341	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11495000	11495000	11495000	
342	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8230000	8230000	8230000	
343	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	43540000	43540000	43540000	
344	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13765000	13765000	13765000	
345	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2737000	2737000	2737000	
346	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22800000	22800000	22800000	
347	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	23820000	23820000	23820000	
348	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	109920000	109920000	109920000	
349	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	182880000	182880000	182880000	
350	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	37360000	37360000	37360000	
351	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	354940000	354940000	354940000	
352	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Nanga Tebidah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	155420000	155420000	155420000	
353	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	287800000	287800000	287800000	
354	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	127420000	127420000	127420000	
355	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	135900000	135900000	135900000	
356	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	179050000	179050000	179050000	
357	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	56010000	56010000	56010000	
358	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	83633000	83633000	83633000	
359	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3150000	3150000	3150000	
360	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	60930000	60930000	60930000	
361	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	56580000	56580000	56580000	
362	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	163404000	163404000	163404000	
363	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	79800000	79800000	79800000	
364	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	46340000	46340000	46340000	
365	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	69000000	69000000	69000000	
366	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	124910000	124910000	124910000	
367	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	70330000	70330000	70330000	
368	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	136000000	136000000	136000000	
369	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	104528000	104528000	104528000	
370	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5604000	5604000	5604000	
371	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1363351000	1363351000	1363351000	Infrastruktur dan Sanitasi
372	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23782500	23782500	23782500	
373	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4322725200	4322725200	4322725200	

374	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0	0	0	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
375	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0023	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	188882000	188882000	188882000	
376	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1041643000	1041643000	1041643000	
377	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	103863000	103863000	103863000	
378	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	180420000	180420000	180420000	
379	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	2.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	143760000	143760000	143760000	
380	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8480000	8480000	8480000	
381	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Nanga Tebidah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19231000	19231000	19231000	
382	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10076000	10076000	10076000	
383	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7744000	7744000	7744000	
384	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	764000	764000	764000	
385	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2076000	2076000	2076000	
386	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5600000	5600000	5600000	
387	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	750000	750000	750000	
388	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3920000	3920000	3920000	
389	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5520000	5520000	5520000	
390	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13968000	13968000	13968000	
391	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2071000	2071000	2071000	
392	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	25492000	25492000	25492000	
393	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2295000	2295000	2295000	
394	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4940000	4940000	4940000	
395	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)	23905200	23905200	23905200	Infrastruktur dan Sanitasi
396	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12658000	12658000	12658000	Infrastruktur dan Sanitasi
397	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21270997549	21270997549	21270997549	
398	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,54238E+11	1,54238E+11	1,54238E+11	
399	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0025	Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
400	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	Infrastruktur dan Sanitasi
401	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.2.01.08,2.2.01.09.02.0033	Dana Alokasi Umum (DAU),DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	22645000	22645000	22645000	Infrastruktur dan Sanitasi
402	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16579000	16579000	16579000	Infrastruktur dan Sanitasi
403	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	
404	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36200000	36200000	36200000	Infrastruktur dan Sanitasi
405	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10000000	10000000	10000000	Infrastruktur dan Sanitasi
406	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30000000	30000000	30000000	Infrastruktur dan Sanitasi
407	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30000000	30000000	30000000	Infrastruktur dan Sanitasi
408	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	Infrastruktur dan Sanitasi
409	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15763000	15763000	15763000	
410	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.4.01,2.2.01.08.02.0005	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	940000000	940000000	940000000	Infrastruktur dan Sanitasi
411	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7800000	7800000	7800000	Infrastruktur dan Sanitasi
412	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	300000000	300000000	300000000	Infrastruktur dan Sanitasi
413	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	400000000	400000000	400000000	Infrastruktur dan Sanitasi

414	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	
415	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5600614104	5600614104	5600614104	
416	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	455245000	455245000	455245000	Infrastruktur dan Sanitasi
417	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0025	Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	54000000	54000000	54000000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
418	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1906790900	1906790900	1906790900	Infrastruktur dan Sanitasi
419	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0025	Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1012320000	1012320000	1012320000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
420	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	54000000	54000000	54000000	
421	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	38000000	38000000	38000000	Infrastruktur dan Sanitasi
422	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	107500000	107500000	107500000	Infrastruktur dan Sanitasi
423	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10000000	10000000	10000000	
424	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna Lainnya	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)	400000000	400000000	400000000	Infrastruktur dan Sanitasi
425	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16	Pendapatan dari BLUD	94920377641	94920377641	94920377641	
426	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1539778729	1539778729	1539778729	Infrastruktur dan Sanitasi
427	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0022	Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16	Pendapatan dari BLUD	0	0	0	Infrastruktur dan Sanitasi
428	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0023	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	794823166,7	794823166,7	794823166,7	Infrastruktur dan Sanitasi
429	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kemangai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1322513243	1322513243	1322513243	Infrastruktur dan Sanitasi
430	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Nanga Tebidah	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1603221010	1603221010	1603221010	Infrastruktur dan Sanitasi
431	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Sepauk	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2519668220	2519668220	2519668220	Infrastruktur dan Sanitasi
432	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tempunak	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1041052466	1041052466	1041052466	Infrastruktur dan Sanitasi
433	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Jelimpau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	525052435,6	525052435,6	525052435,6	Infrastruktur dan Sanitasi
434	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Pandan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1526344314	1526344314	1526344314	Infrastruktur dan Sanitasi
435	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sungai Durian	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2373322136	2373322136	2373322136	Infrastruktur dan Sanitasi
436	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tanjung Puri	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2317199255	2317199255	2317199255	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
437	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dara Juanti	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	659805340,4	659805340,4	659805340,4	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
438	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dedai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	967119523,2	967119523,2	967119523,2	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
439	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Emparu	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	756879663,2	756879663,2	756879663,2	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
440	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nanga Mau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2177038466	2177038466	2177038466	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
441	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kebong	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1327490146	1327490146	1327490146	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
442	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Nanga Lebang	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	434308399,5	434308399,5	434308399,5	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
443	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mensiku	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1094507729	1094507729	1094507729	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
444	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Nanga Ketungau	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	898920516,8	898920516,8	898920516,8	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
445	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Serangas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	955182585,8	955182585,8	955182585,8	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
446	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Senaning	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1880938371	1880938371	1880938371	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
447	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Merakai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1967131251	1967131251	1967131251	Infrastruktur dan Sanitasi,PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
448	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0026	Rumah Sakit Umum Daerah Serawai	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1.04.16,1.4.01	Pendapatan dari BLUD,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1250007645	1250007645	1250007645	Infrastruktur dan Sanitasi
449	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.4.01,1.2.01.08,2.2.02.02.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	16618478000	16618478000	16618478000	Infrastruktur dan Sanitasi
450	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	776000000	776000000	776000000	Infrastruktur dan Sanitasi
451	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	Infrastruktur dan Sanitasi
452	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1415618000	1415618000	1415618000	Infrastruktur dan Sanitasi
453	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1600500000	1600500000	1600500000	Infrastruktur dan Sanitasi
454	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.

460	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.4.01,1.2.01.08,2.2.01.07.03.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),DBH Sawit	3090600000	3090600000	3090600000	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi
461	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0004	UPT. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	191825000	191825000	191825000	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi
462	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0002	UPT. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilavah II	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	330000000	330000000	330000000	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi
463	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	1.4.01,1.2.01.08,2.1.01.20.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),Opsen PKB	5401725000	5401725000	5401725000	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi
464	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	1.4.01,1.2.01.08,2.2.01.06.02.0001,2.2.01.07.03.0001,2.2.01.08.02.0006,2.2.02.02.01.0001,2.1.01.20.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan,DBH Sawit,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum,Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.Opsen PKB	17051468214	17051468214	17051468214	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi
465	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	200000000	200000000	200000000	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi
466	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0001	UPT. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4741000000	4741000000	4741000000	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi
467	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0002	UPT. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.4.01,1.2.01.08,2.2.01.07.03.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),DBH Sawit	20449208811	20449208811	20449208811	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi
468	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0003	UPT. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	5686774144	5686774144	5686774144	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi
469	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0004	UPT. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2922250000	2922250000	2922250000	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi
470	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	76308000	76308000	76308000	Infrastruktur dan Sanitasi
471	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	45000000	45000000	45000000	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi
472	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11900000	11900000	11900000	Infrastruktur dan Sanitasi
473	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	212426800	212426800	212426800	Infrastruktur dan Sanitasi
474	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25719600	25719600	25719600	Infrastruktur dan Sanitasi
475	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	211815000	211815000	211815000	Infrastruktur dan Sanitasi
476	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9606881280	9606881280	9606881280	Infrastruktur dan Sanitasi
477	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyuilan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19152000	19152000	19152000	Infrastruktur dan Sanitasi
478	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1050000	1050000	1050000	Infrastruktur dan Sanitasi
479	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10000000	10000000	10000000	Infrastruktur dan Sanitasi
480	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10000000	10000000	10000000	Infrastruktur dan Sanitasi
481	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10839500	10839500	10839500	Infrastruktur dan Sanitasi
482	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20496000	20496000	20496000	Infrastruktur dan Sanitasi
483	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	990000	990000	990000	Infrastruktur dan Sanitasi
484	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30000000	30000000	30000000	Infrastruktur dan Sanitasi
485	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10000000	10000000	10000000	Infrastruktur dan Sanitasi
486	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	60290000	60290000	60290000	Infrastruktur dan Sanitasi
487	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	Infrastruktur dan Sanitasi
488	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11000000	11000000	11000000	Infrastruktur dan Sanitasi
489	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	172470000	172470000	172470000	Infrastruktur dan Sanitasi
490	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30630000	30630000	30630000	Infrastruktur dan Sanitasi
491	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	68900000	68900000	68900000	Infrastruktur dan Sanitasi
492	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	31012750	31012750	31012750	Infrastruktur dan Sanitasi
493	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1173155000	1173155000	1173155000	Infrastruktur dan Sanitasi
494	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000000	2000000	2000000	Infrastruktur dan Sanitasi
495	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	160500000	160500000	160500000	Infrastruktur dan Sanitasi
496	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1414244400	1414244400	1414244400	Infrastruktur dan Sanitasi
497	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	148950000	148950000	148950000	Infrastruktur dan Sanitasi
498	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	275000000	275000000	275000000	Infrastruktur dan Sanitasi
499	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	Infrastruktur dan Sanitasi
500	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.2.13.5.01.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12820000	12820000	12820000	Infrastruktur dan Sanitasi
501	2025

510	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50000000	50000000	50000000	
511	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	5312370000	5312370000	5312370000	Infrastruktur dan Sanitasi
512	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.4.01.1.2.01.08,2.2.02.02.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	18783496390	18783496390	18783496390	Infrastruktur dan Sanitasi
513	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	28960000	28960000	28960000	
514	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	41277202085	41277202085	41277202085	Infrastruktur dan Sanitasi,PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
515	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	749075000	749075000	749075000	Infrastruktur dan Sanitasi
516	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	28950000	28950000	28950000	
517	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	215000000	215000000	215000000	Infrastruktur dan Sanitasi
518	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	1077840000	1077840000	1077840000	Infrastruktur dan Sanitasi,PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
519	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	14710000	14710000	14710000	
520	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	15350000	15350000	15350000	
521	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4530544000	4530544000	4530544000	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
522	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18000000	18000000	18000000	
523	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30479600	30479600	30479600	
524	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	22415000	22415000	22415000	
525	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14859200	14859200	14859200	
526	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	209109020	209109020	209109020	
527	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19344400	19344400	19344400	
528	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11344800	11344800	11344800	
529	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7200000	7200000	7200000	
530	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	159441000	159441000	159441000	
531	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0	
532	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3000000	3000000	3000000	
533	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	90000000	90000000	90000000	
534	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	542419200	542419200	542419200	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
535	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	51474000	51474000	51474000	
536	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20144000	20144000	20144000	
537	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01.2.13	Penataan Organisasi	1.04.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29297000	29297000	29297000	Infrastruktur dan Sanitasi
538	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49999338	49999338	49999338	
539	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	142723710	142723710	142723710	
540	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	57883450	57883450	57883450	
541	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50274100	50274100	50274100	
542	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	10506952838	10506952838	10506952838	
543	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	43292890	43292890	43292890	
544	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
545	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3347124560	3347124560	3347124560	
546	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
547	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2496000	2496000	2496000	
548	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05

554	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6660000	6660000	6660000	
555	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3500000	3500000	3500000	
556	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	73920000	73920000	73920000	
557	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	376152000	376152000	376152000	
558	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	80232100	80232100	80232100	
559	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7925400	7925400	7925400	
560	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.1.06.1.03.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7010483	7010483	7010483	
561	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21304000	21304000	21304000	
562	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berisuansa Hak Asasi Manusia	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46999700	46999700	46999700	
563	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33760160	33760160	33760160	
564	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	79405000	79405000	79405000	
565	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19835000	19835000	19835000	
566	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	PEMENUHAN SPM
567	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20193400	20193400	20193400	PEMENUHAN SPM
568	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8070000	8070000	8070000	
569	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24859400	24859400	24859400	
570	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16120000	16120000	16120000	
571	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
572	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	109417800	109417800	109417800	PEMENUHAN SPM
573	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	42513000	42513000	42513000	
574	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	59939200	59939200	59939200	PEMENUHAN SPM
575	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5470200	5470200	5470200	
576	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3579400	3579400	3579400	
577	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9171267215	9171267215	9171267215	
578	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	11774200	11774200	11774200	
579	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3000000	3000000	3000000	
580	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2998200	2998200	2998200	
581	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4000000	4000000	4000000	
582	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2514400	2514400	2514400	
583	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3999716	3999716	3999716	
584	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	54390000	54390000	54390000	
585	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
586	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9991554	9991554	9991554	
587	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	54454380	54454380	54454380	
588	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	241932610	241932610	241932610	
589	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21352600	21352600	21352600	
590	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1800000	1800000	1800000	
591	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	93379000	93379000	93379000	

592	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	63714000	63714000	63714000	
593	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
594	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99240000	99240000	99240000	
595	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3713716800	3713716800	3713716800	
596	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000000	2000000	2000000	
597	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	102160900	102160900	102160900	
598	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23815000	23815000	23815000	
599	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.11.8.01.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9760000	9760000	9760000	
600	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	178655600	178655600	178655600	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
601	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
602	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5020000	5020000	5020000	Penyediaan cadangan pangan,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.PEMENUHAN SPM
603	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15429000	15429000	15429000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.PEMENUHAN SPM
604	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24065000	24065000	24065000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.PEMENUHAN SPM
605	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9105000	9105000	9105000	PEMENUHAN SPM
606	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	50968200	50968200	50968200	PEMENUHAN SPM
607	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	33750000	33750000	33750000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.PEMENUHAN SPM
608	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13020000	13020000	13020000	PEMENUHAN SPM
609	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8670000	8670000	8670000	PEMENUHAN SPM
610	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30205000	30205000	30205000	PEMENUHAN SPM
611	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	43990000	43990000	43990000	PEMENUHAN SPM
612	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6850000	6850000	6850000	PEMENUHAN SPM
613	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30719000	30719000	30719000	PEMENUHAN SPM
614	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14833800	14833800	14833800	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
615	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	36299200	36299200	36299200	
616	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	251390700	251390700	251390700	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
617	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	2.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13246740	13246740	13246740	
618	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50000000	50000000	50000000	
619	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1500000000	1500000000	1500000000	
620	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	2.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	7330000	7330000	7330000	PEMENUHAN SPM
621	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	2.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	16630000	16630000	16630000	PEMENUHAN SPM
622	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10500000	10500000	10500000	PEMENUHAN SPM
623	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4525000	4525000	4525000	PEMENUHAN SPM
624	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4000000	4000000	4000000	PEMENUHAN SPM
625	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2660000	2660000	2660000	
626	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7169000	7169000	7169000	
627	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1842100	1842100	1842100	
628	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1858000	1858000	1858000	
629	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1687000	1687000	1687000	

630	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2539792346	2539792346	2539792346	
631	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8730000	8730000	8730000	
632	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1079000	1079000	1079000	
633	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5820000	5820000	5820000	
634	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1360000	1360000	1360000	
635	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
636	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	57010260	57010260	57010260	
637	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	28458275	28458275	28458275	
638	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	
639	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13031392	13031392	13031392	
640	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9420800	9420800	9420800	
641	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1800000	1800000	1800000	
642	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	60451000	60451000	60451000	
643	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7000000	7000000	7000000	
644	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8602500	8602500	8602500	
645	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	55944000	55944000	55944000	
646	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4000000	4000000	4000000	
647	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50550000	50550000	50550000	
648	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	201433200	201433200	201433200	
649	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	22222484	22222484	22222484	
650	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35400000	35400000	35400000	
651	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.1.02.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17455000	17455000	17455000	
652	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7000000	7000000	7000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
653	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7000000	7000000	7000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
654	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0001	UPT Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	769999703	769999703	769999703	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
655	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0001	UPT Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100000000	100000000	100000000	
656	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	116799000	116799000	116799000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
657	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	57015000	57015000	57015000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
658	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
659	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	
660	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10000000	10000000	10000000	
661	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
662	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	28782000	28782000	28782000	
663	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	29586000	29586000	29586000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
664	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	27702000	27702000	27702000	
665	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.4.01,2.2.01.07.03.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DBH Sawit	1260000000	1260000000	1260000000	
666	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
667	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
668	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
669	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
670	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4122552988	4122552988	4122552988	
671	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9198000	9198000	9198000	
672	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1800000	1800000	1800000	
673	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN

677	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	6721800	6721800	6721800	
678	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	27335100	27335100	27335100	
679	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10000000	10000000	10000000	
680	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46695000	46695000	46695000	
681	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11044000	11044000	11044000	
682	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	85750000	85750000	85750000	
683	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2886000	2886000	2886000	
684	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2685000	2685000	2685000	
685	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	45000000	45000000	45000000	
686	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	201580800	201580800	201580800	
687	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40400000	40400000	40400000	
688	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62631500	62631500	62631500	
689	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3660000	3660000	3660000	
690	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7300000	7300000	7300000	
691	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
692	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	97925000	97925000	97925000	
693	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	25818000	25818000	25818000	
694	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	20472000	20472000	20472000	
695	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	115000000	115000000	115000000	
696	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	69020000	69020000	69020000	
697	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80000000	80000000	80000000	
698	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam MewujudkanKG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	22800000	22800000	22800000	
699	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.4.01,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	105688000	105688000	105688000	
700	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ keaiatan pencegahan KTA	2.2.01.08.02.0004,2.2.01.09.02.0022	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	126530000	126530000	126530000	
701	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	2.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	115140000	115140000	115140000	
702	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	38339400	38339400	38339400	
703	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10896000	10896000	10896000	
704	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	
705	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4364848927	4364848927	4364848927	
706	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyulian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11628000	11628000	11628000	
707	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	38273400	38273400	38273400	
708	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	
709	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	
710	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9884000	9884000	9884000	
711	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16737000	16737000	16737000	
712	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	
713	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3248000	3248000	3248000	
714	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.0003

719	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1000000	1000000	1000000	
720	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	61200000	61200000	61200000	
721	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	387810800	387810800	387810800	
722	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	70000000	70000000	70000000	
723	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1.2.01.08,2.2.01.08.02.0004	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	129970000	129970000	129970000	
724	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	444292000	444292000	444292000	
725	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	168000000	168000000	168000000	
726	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	2.2.01.08.02.0005,2.2.01.09.02.0021	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKB-KB	124514000	124514000	124514000	
727	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	690480000	690480000	690480000	
728	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2.2.01.08.02.0005,2.2.01.09.02.0021	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKB-KB	1004626000	1004626000	1004626000	
729	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	125000000	125000000	125000000	
730	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0	0		
731	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	351392000	351392000	351392000	
732	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1925108000	1925108000	1925108000	
733	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	36000000	36000000	36000000	
734	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	696808000	696808000	696808000	
735	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.2.01.09.01.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0	0	0	
736	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jarinzan dan Jejarinenya	2.2.01.08.02.0005,2.2.01.09.02.0021	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKB-KB	44652000	44652000	44652000	
737	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0	0	0	
738	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	2.2.01.08.02.0005,2.2.01.09.02.0021	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKB-KB	196570000	196570000	196570000	
739	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1.2.01.08,2.2.01.09.02.0021	Dana Alokasi Umum (DAU),DAK Non Fisik-BOKB-KB	228800000	228800000	228800000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
740	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendaaatan Keluarga Aksestor (UPPKA)I	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99999520	99999520	99999520	
741	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksептor (UPPKA)	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	130000000	130000000	130000000	
742	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1434000000	1434000000	1434000000	
743	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1720800000	1720800000	1720800000	PENURUNAN STUNTING
744	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	120002240	120002240	120002240	Penyediaan cadangan pangan
745	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10826000	10826000	10826000	Penyediaan cadangan pangan
746	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25966000	25966000	25966000	Penyediaan cadangan pangan
747	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11951000	11951000	11951000	Penyediaan cadangan pangan
748	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	400000200	400000200	400000200	Penyediaan cadangan pangan
749	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	115000000	115000000	115000000	Penyediaan cadangan pangan
750	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Aneka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7926000	7926000	7926000	Penyediaan cadangan pangan
751	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankeragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14250000	14250000	14250000	Penyediaan cadangan pangan
752	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perk

756	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8379000	8379000	8379000				
757	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6668600	6668600	6668600				
758	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4060498827	4060498827	4060498827				
759	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7848000	7848000	7848000				
760	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4549000	4549000	4549000				
761	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35402110	35402110	35402110				
762	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26774000	26774000	26774000				
763	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10193000	10193000	10193000				
764	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35959510	35959510	35959510				
765	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	55870894	55870894	55870894				
766	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7218800	7218800	7218800				
767	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	82901800	82901800	82901800				
768	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	38223000	38223000	38223000				
769	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	177225000	177225000	177225000				
770	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1990000	1990000	1990000				
771	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	136032000	136032000	136032000				
772	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	289142400	289142400	289142400				
773	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16550000	16550000	16550000				
774	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50850000	50850000	50850000				
775	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33020000	33020000	33020000				
776	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	200000000	200000000	200000000	Penyediaan cadangan pangan			
777	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.4.01,1.2.01.08,2.2.01.09.03 .0032	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	11313437800	11313437800	11313437800	Penyediaan cadangan pangan			
778	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	Penyediaan cadangan pangan			
779	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.3.25.0.00.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	Penyediaan cadangan pangan			
780	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	219945410	219945410	219945410				
781	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21521592	21521592	21521592				
782	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	649999570	649999570	649999570				
783	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26630010	26630010	26630010				
784	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	27529908	27529908	27529908				
785	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21199870	21199870	21199870				
786	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14403360	14403360	14403360				
787	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15184134	15184134	15184134				
788	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3822859153	3822859153	3822859153				
789	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9570000	9570000	9570000				
790	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16244850	16244850	16244850				
791	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21312000	21312000	21312000				
792	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7498050	7498050	7498050				
793	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24999420	24999420	24999420				
794	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7998105	7998105	7998105				
795	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	28023060	28023060	28023060				
796	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16896420	16896420	16896420				
797	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5328000	5328000	5328000				
798	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000				
799	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

809	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46974810	46974810	46974810	
810	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10.1.03.0.00.23.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13419970	13419970	13419970	
811	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	190389040	190389040	190389040	
812	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaotasi Perubahan Iklim	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	47353000	47353000	47353000	
813	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.2.01.08,2.1.01.12.01.0001	Dana Alokasi Umum (DAU),Pajak Air Tanah	84571000	84571000	84571000	
814	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0001	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33020000	33020000	33020000	
815	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0001	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	55600000	55600000	55600000	
816	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0001	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	77150000	77150000	77150000	
817	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0001	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	158414000	158414000	158414000	
818	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	165799700	165799700	165799700	
819	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12390000	12390000	12390000	
820	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16494000	16494000	16494000	
821	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18450000	18450000	18450000	
822	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10950000	10950000	10950000	
823	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23610000	23610000	23610000	
824	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	51500000	51500000	51500000	
825	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.2.01	Pemberian Pengharaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penaeloloan Linkunaan Hiduo	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13745000	13745000	13745000	
826	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17990000	17990000	17990000	
827	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Linakunaan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25000000	25000000	25000000	
828	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	119360000	119360000	119360000	
829	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	299999700	299999700	299999700	
830	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	316870688	316870688	316870688	
831	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	999997750	999997750	999997750	
832	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	372170160	372170160	372170160	
833	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6829550	6829550	6829550	
834	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8969950	8969950	8969950	
835	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6999200	6999200	6999200	
836	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7202236683	7202236683	7202236683	
837	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20974000	20974000	20974000	
838	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9110000	9110000	9110000	
839	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000000	2000000	2000000	
840	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2527650	2527650	2527650	
841	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3500000	3500000	3500000	
842	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000000	2000000	2000000	
843	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000000	2000000	2000000	
844	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5147600	5147600	5147600	
845	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	159107037,5	159107037,5	159107037,5	
846	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Keoeawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
847	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	
848	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3134000	3134000	3134000	
849	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3994224	3994224	3994224	
850	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.

856	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15396000	15396000	15396000	
857	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3700000	3700000	3700000	
858	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	125000000	125000000	125000000	
859	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
860	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3919543200	3919543200	3919543200	
861	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13000000	13000000	13000000	
862	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.1.03.1.04.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	72609000	72609000	72609000	
863	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1248750	1248750	1248750	
864	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1332000	1332000	1332000	
865	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5106000	5106000	5106000	
866	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Keependudukan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	116267440	116267440	116267440	
867	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	370716290	370716290	370716290	
868	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	46148870	46148870	46148870	
869	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	46440780	46440780	46440780	
870	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	172560050	172560050	172560050	
871	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	37616160	37616160	37616160	
872	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		
873	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		
874	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18959000	18959000	18959000	
875	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Keependudukan	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36646680	36646680	36646680	
876	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14545000	14545000	14545000	
877	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	41540660	41540660	41540660	
878	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	132154000	132154000	132154000	
879	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20031000	20031000	20031000	
880	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25772650	25772650	25772650	
881	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000424	20000424	20000424	
882	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14170260	14170260	14170260	
883	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5929900	5929900	5929900	
884	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5835000	5835000	5835000	
885	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13551750	13551750	13551750	
886	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4630445895	4630445895	4630445895	
887	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14000430	14000430	14000430	
888	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14237970	14237970	14237970	
889	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.12.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12526000	12526000	12526000	
890	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2991450	2991450	2991450	
891	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	127665080	127665080	127665080	
892	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	28488500	28488500	28488500	
893	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32932590	32932590	32932590	
894	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1800000	1800000	1800000	
895	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2219750	2219750	2219750	
896	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi

897	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		
898	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	134410000	134410000	134410000	
899	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	684136000	684136000	684136000	
900	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
901	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	58750000	58750000	58750000	
902	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7659000	7659000	7659000	
903	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1419216	1419216	1419216	
904	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8540000	8540000	8540000	
905	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	5475914964	5475914964	5475914964	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
906	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17291040	17291040	17291040	PENURUNAN STUNTING
907	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16094120	16094120	16094120	Infrastruktur dan Sanitasi
908	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75504396	75504396	75504396	
909	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	31531280	31531280	31531280	
910	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39069600	39069600	39069600	
911	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.Dana Alokasi Umum (DAU)	182279600	182279600	182279600	
912	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	28276380	28276380	28276380	
913	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	53441520	53441520	53441520	
914	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	27446160	27446160	27446160	
915	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	51206160	51206160	51206160	
916	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	269239964	269239964	269239964	
917	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	603772800	603772800	603772800	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
918	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3843220197	3843220197	3843220197	
919	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funesi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
920	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4548800	4548800	4548800	
921	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26912850	26912850	26912850	Infrastruktur dan Sanitasi
922	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1906500	1906500	1906500	
923	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40677600	40677600	40677600	
924	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9072412	9072412	9072412	
925	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1800000	1800000	1800000	
926	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.Dana Alokasi Umum (DAU)	140403000	140403000	140403000	
927	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23310000	23310000	23310000	Infrastruktur dan Sanitasi
928	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50000000	50000000	50000000	
929	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	37920000	37920000	37920000	
930	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	366214800	366214800	366214800	
931	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	76510000	76510000	76510000	
932	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13.1.02.1.01.03.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9700000	9700000	9700000	Infrastruktur dan Sanitasi
933	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75000000	75000000	75000000	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
934	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.2.01.08,2.1.01.19.02.0001, 2.1.01.19.02.0002	Dana Alokasi Umum (DAU),PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain,PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	1903144680	1903144680	1903144680	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
935	2025	2	UR

939	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1.1,1.2.01.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	10676000	10676000	10676000	
940	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5360200	5360200	5360200	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
941	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	22631000	22631000	22631000	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
942	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	2.15.03.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13246000	13246000	13246000	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
943	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34800000	34800000	34800000	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
944	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	25790000	25790000	25790000	
945	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.2.01.08,2.2.01.09.01.0047	Dana Alokasi Umum (DAU),DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	200000000	200000000	200000000	Infrastruktur dan Sanitasi,PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
946	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11545000	11545000	11545000	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
947	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19312500	19312500	19312500	Infrastruktur dan Sanitasi
948	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7498500	7498500	7498500	Infrastruktur dan Sanitasi
949	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6313721825	6313721825	6313721825	
950	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4460000	4460000	4460000	
951	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4000000	4000000	4000000	
952	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	85751150	85751150	85751150	Infrastruktur dan Sanitasi
953	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenanaean Peranakat Daerah	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20869500	20869500	20869500	
954	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5234000	5234000	5234000	
955	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6527400	6527400	6527400	
956	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	62914800	62914800	62914800	Infrastruktur dan Sanitasi
957	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6919000	6919000	6919000	
958	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	38030000	38030000	38030000	Infrastruktur dan Sanitasi
959	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14990000	14990000	14990000	Infrastruktur dan Sanitasi
960	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	194485000	194485000	194485000	
961	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	51750000	51750000	51750000	Infrastruktur dan Sanitasi
962	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3000000	3000000	3000000	
963	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	55080000	55080000	55080000	Infrastruktur dan Sanitasi
964	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	437341800	437341800	437341800	Infrastruktur dan Sanitasi
965	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40010000	40010000	40010000	Infrastruktur dan Sanitasi
966	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanean	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	59650000	59650000	59650000	Infrastruktur dan Sanitasi
967	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32187800	32187800	32187800	Infrastruktur dan Sanitasi
968	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.5.04.2.13.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16661100	16661100	16661100	Infrastruktur dan Sanitasi
969	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	2155746000	2155746000	2155746000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
970	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2490000	2490000	2490000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
971	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	79291000	79291000	79291000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
972	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	52326000	52326000	52326000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
973	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30115000	30115000	30115000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
974	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	101466000	101466000	101466000	
975	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12586000	12586000	12586000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
976	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	159982000	159982000	159982000	Infrastruktur dan Sanitasi,PEMENUHAN SPM

977	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100000000	100000000	100000000	Infrastruktur dan Sanitasi
978	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14350000	14350000	14350000	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.PEMENUHAN SPM
979	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	536980450	536980450	536980450	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.PEMENUHAN SPM
980	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	2081000000	2081000000	2081000000	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.PEMENUHAN SPM
981	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4684671814	4684671814	4684671814	
982	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11382000	11382000	11382000	
983	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkaannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	37500000	37500000	37500000	
984	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	82293000	82293000	82293000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
985	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6630000	6630000	6630000	Infrastruktur dan Sanitasi
986	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49563000	49563000	49563000	Infrastruktur dan Sanitasi
987	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7300000	7300000	7300000	Infrastruktur dan Sanitasi
988	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15012000	15012000	15012000	Infrastruktur dan Sanitasi
989	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30491600	30491600	30491600	Infrastruktur dan Sanitasi
990	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	204932000	204932000	204932000	
991	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24750000	24750000	24750000	Infrastruktur dan Sanitasi
992	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	44100000	44100000	44100000	Infrastruktur dan Sanitasi
993	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4800000	4800000	4800000	
994	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75300000	75300000	75300000	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
995	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12180000	12180000	12180000	Infrastruktur dan Sanitasi
996	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08,2.2.01.08.02.0004	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	643083600	643083600	643083600	Infrastruktur dan Sanitasi
997	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	Infrastruktur dan Sanitasi
998	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30000000	30000000	30000000	Infrastruktur dan Sanitasi
999	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	2.16.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1000	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	22325000	22325000	22325000	Infrastruktur dan Sanitasi
1001	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20288000	20288000	20288000	Infrastruktur dan Sanitasi
1002	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	51682000	51682000	51682000	Infrastruktur dan Sanitasi
1003	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	57149000	57149000	57149000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1004	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	38752050	38752050	38752050	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1005	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	146499650	146499650	146499650	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1006	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	22014700	22014700	22014700	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1007	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	55933000	55933000	55933000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1008	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1009	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	72047000	72047000	72047000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1010	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	70183000	70183000	70183000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1011	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	60327000	60327000	60327000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1012	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4315000	4315000	4315000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1013	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4310000	4310000	4310000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1014	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1017	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4850800	4850800	4850800	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1018	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	39960000	39960000	39960000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1019	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	47956000	47956000	47956000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1020	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	27978000	27978000	27978000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1021	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18015300	18015300	18015300	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1022	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	48004920	48004920	48004920	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1023	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13594725	13594725	13594725	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1024	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	62952000	62952000	62952000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1025	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32714808	32714808	32714808	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1026	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5400000	5400000	5400000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1027	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9920668	9920668	9920668	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1028	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	144652000	144652000	144652000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1029	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1030	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1031	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16983000	16983000	16983000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1032	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	54390000	54390000	54390000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1033	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18648000	18648000	18648000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1034	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3000000	3000000	3000000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1035	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	135000000	135000000	135000000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1036	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	412620000	412620000	412620000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1037	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	45010000	45010000	45010000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1038	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24100000	24100000	24100000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1039	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	35797500	35797500	35797500	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1040	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	250010000	250010000	250010000	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1041	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	40159800	40159800	40159800	PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI
1042	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	250000000	250000000	250000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1043	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	135906000	135906000	135906000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1044	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	26356000	26356000	26356000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1045	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	630000000	630000000	630000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1046	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.4.01,2.2.01.08.02.0004	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	477977000	477977000	477977000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1047	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	109106000	109106000	109106000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1048	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	30000000	30000000	30000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1049	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	450000000	450000000	450000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1050	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwis

1053	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	1100000000	1100000000	1100000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1054	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	1.2.01.08,2.2.01.08.02.0004	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	107402000	107402000	107402000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1055	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18620000	18620000	18620000	
1056	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8000000	8000000	8000000	
1057	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6990000	6990000	6990000	
1058	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineria dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	
1059	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6846800	6846800	6846800	
1060	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3676218174	3676218174	3676218174	
1061	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14455000	14455000	14455000	
1062	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3335000	3335000	3335000	
1063	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	
1064	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	
1065	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	
1066	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10000000	10000000	10000000	
1067	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3000000	3000000	3000000	
1068	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29800000	29800000	29800000	
1069	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8830000	8830000	8830000	
1070	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25000000	25000000	25000000	
1071	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	29196000	29196000	29196000	
1072	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8000000	8000000	8000000	
1073	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75275000	75275000	75275000	
1074	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1000000	1000000	1000000	
1075	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	120600000	120600000	120600000	
1076	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	530526000	530526000	530526000	
1077	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	22500000	22500000	22500000	
1078	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1600000	1600000	1600000	
1079	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	28246000	28246000	28246000	
1080	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.13	Penataan Organisasi	2.19.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8000000	8000000	8000000	
1081	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	80000000	80000000	80000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1082	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	570000000	570000000	570000000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1083	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	150630000	150630000	150630000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1084	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0	0		Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1085	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	18200000	18200000	18200000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1086	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	599500000	599500000	599500000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1087	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	596370250	596370250	596370250	
1088	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	54899500	54899500	54899500	
1089	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	10954650	10954650	10954650	
1090	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	82801300	82801300	82801300	
1091	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	101604460	101604460	101604460	
1092	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	181484418	181484418	181484418	
1093	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.

1102	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5840000	5840000	5840000	
1103	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3560400	3560400	3560400	
1104	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6135800	6135800	6135800	
1105	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26635000	26635000	26635000	
1106	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10440000	10440000	10440000	
1107	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26292500	26292500	26292500	
1108	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15905000	15905000	15905000	
1109	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	121087000	121087000	121087000	
1110	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17792000	17792000	17792000	
1111	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10989000	10989000	10989000	
1112	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	101000000	101000000	101000000	
1113	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	321567200	321567200	321567200	
1114	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12100000	12100000	12100000	
1115	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	47240000	47240000	47240000	
1116	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6100000	6100000	6100000	
1117	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14600000	14600000	14600000	
1118	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	51600000	51600000	51600000	
1119	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33606500	33606500	33606500	
1120	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46119000	46119000	46119000	
1121	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.2.01.08,2.2.02.02.01.0001	Dana Alokasi Umum (DAU),Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1696000000	1696000000	1696000000	Penyediaan cadangan pangan,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1122	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.4.01,1.2.01.08,2.2.02.02.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8330761000	8330761000	8330761000	Penyediaan cadangan pangan,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1123	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	1919123000	1919123000	1919123000	Penyediaan cadangan pangan,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1124	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	146326000	146326000	146326000	Penyediaan cadangan pangan
1125	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	2.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	578892400	578892400	578892400	Penyediaan cadangan pangan
1126	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	2.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	0	Penyediaan cadangan pangan
1127	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	2.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	0	0	0	Penyediaan cadangan pangan
1128	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3145615000	3145615000	3145615000	Penyediaan cadangan pangan
1129	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	574000000	574000000	574000000	Penyediaan cadangan pangan
1130	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	Penyediaan cadangan pangan
1131	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36074000	36074000	36074000	
1132	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	31350000	31350000	31350000	Penyediaan cadangan pangan
1133	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	175000000	175000000	175000000	
1134	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	311208000	311208000	311208000	
1135	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	205482000	205482000	205482000	
1136	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	500100000	500100000	500100000	
1137	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	2.2.01.09.02.0043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	484500000	484500000	484500000	
1138	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	0	0	0	
1139	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKPAnar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9233000	9233000	9233000	
1140	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18155434659	18155434659	18155434659	
1141	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13800000	13800000	13800000	
1142	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8177400	8177400	8177400	
1143	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9145000	9145000	9145000	
1144	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9166800	9166800	9166800	
1145	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26477000	26477000	26477000	
1146	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Kom

1152	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	155529500	155529500	155529500	
1153	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9736500	9736500	9736500	
1154	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10800000	10800000	10800000	
1155	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9941000	9941000	9941000	
1156	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	134000000	134000000	134000000	
1157	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1062369400	1062369400	1062369400	
1158	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	64542504	64542504	64542504	Penyediaan cadangan pangan
1159	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5445800	5445800	5445800	
1160	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19999078	19999078	19999078	
1161	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27.3.28.2.11.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	25730000	25730000	25730000	
1162	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	37050000	37050000	37050000	Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi
1163	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1117500000	1117500000	1117500000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1164	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	170323940	170323940	170323940	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1165	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35222000	35222000	35222000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1166	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25206000	25206000	25206000	
1167	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.1.02.01,1.2.01.08	Retribusi Jasa Umum,Dana Alokasi Umum (DAU)	1050148012	1050148012	1050148012	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1168	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.1.02.01,1.4.01	Retribusi Jasa Umum,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92335100	92335100	92335100	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1169	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.1.02.01,1.4.01	Retribusi Jasa Umum,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	224775288	224775288	224775288	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1170	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23936200	23936200	23936200	Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi
1171	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	267054800	267054800	267054800	Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi
1172	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
1173	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31.3.30.2.17.01.0001	UPT. Metrologi Legal	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Penaawasan	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40832730	40832730	40832730	
1174	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24766000	24766000	24766000	
1175	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2000000000	2000000000	2000000000	
1176	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	27654896	27654896	27654896	
1177	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penvamoaian Data ke SIINas	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36069864	36069864	36069864	
1178	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	42137800	42137800	42137800	
1179	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		
1180	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	22365000	22365000	22365000	
1181	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5770076574	5770076574	5770076574	
1182	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	16072000	16072000	16072000	
1183	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
1184	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
1185	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.31.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Baranz Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5481000	5481000	5481000	
1186	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20888000	20888000	20888000	
1187	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6077250	6077250	6077250	
1188	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19999650	19999650	19999650	
1189	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenaah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7001436	7001436	7001436	
1190	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20003865	20003865	20003865	
1191	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20001090	20001090	20001090	
1192	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.

1198	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	556623600	556623600	556623600	
1199	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	57769968	57769968	57769968	
1200	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenegah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menenegah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14585400	14585400	14585400	
1201	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menenegah	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menenegah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	101126711	101126711	101126711	
1202	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	168385600	168385600	168385600	
1203	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	101128000	101128000	101128000	
1204	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	348900300	348900300	348900300	
1205	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.4.01,1.2.01.08,2.2.01.08.02.0005	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	19554432518	19554432518	19554432518	
1206	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	234695800	234695800	234695800	
1207	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	316479800	316479800	316479800	
1208	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	171754250	171754250	171754250	
1209	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	164417194	164417194	164417194	
1210	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	91221498	91221498	91221498	
1211	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	95557950	95557950	95557950	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1212	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	235650126	235650126	235650126	
1213	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34301820	34301820	34301820	
1214	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33483960	33483960	33483960	
1215	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35100976	35100976	35100976	
1216	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	85452800	85452800	85452800	
1217	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	122690828,9	122690828,9	122690828,9	
1218	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	110152969	110152969	110152969	
1219	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	54592000	54592000	54592000	
1220	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	41502000	41502000	41502000	
1221	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	41952000	41952000	41952000	
1222	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20748000	20748000	20748000	
1223	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6263000	6263000	6263000	
1224	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19383846160	19383846160	19383846160	
1225	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32640000	32640000	32640000	
1226	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2499708	2499708	2499708	
1227	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4999884	4999884	4999884	
1228	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	89162595	89162595	89162595	
1229	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4500000	4500000	4500000	
1230	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenanaan Perangkat Daerah	4.01.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	225825800	225825800	225825800	
1231	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenanaan Peranekat Daerah	4.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17173000	17173000	17173000	
1232	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	253080000	253080000	253080000	
1233	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6000000	6000000	6000000	
1234	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	449403080	449403080	449403080	
1235	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1237166800	1237166800	1237166800	
1236	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	466950782	466950782	466950782	
1237	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	365668850	365668850	365668850	
1238	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	723386100	723386100	723386100	
1239	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1164937980	1164937980	1164937980	
1240	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4035461000	4035461000	4035461000	
1241	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	120880320	120880320	120880320	
1242	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1897588000	1897588000	1897588000	
1243	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	402042000	402042000	402042000	
1244	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14000000	14000000	14000000	
1245	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08,2.1.01.19.02.0001	Dana Alokasi Umum (DAU),PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1981334400	1981334400	1981334400	
1246	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3009088700	3009088700	3009088700	
1247	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2986840000	2986840000	2986840000	
1248	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	47197735	47197735	47197735	
1249	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKR

1253	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1529497000	1529497000	1529497000	
1254	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1262236500	1262236500	1262236500	
1255	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	530126720	530126720	530126720	
1256	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	87310400	87310400	87310400	
1257	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	71042960	71042960	71042960	
1258	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30336982	30336982	30336982	
1259	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40343982	40343982	40343982	
1260	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	37871600	37871600	37871600	
1261	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	74703950	74703950	74703950	
1262	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.5.01.1.01.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	1099608650	1099608650	1099608650	
1263	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	107065000	107065000	107065000	
1264	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	481331000	481331000	481331000	
1265	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4470000	4470000	4470000	
1266	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5050000	5050000	5050000	
1267	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4700000	4700000	4700000	
1268	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36630000	36630000	36630000	
1269	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32028000	32028000	32028000	
1270	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	268057884	268057884	268057884	
1271	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	269848884	269848884	269848884	
1272	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23170000	23170000	23170000	
1273	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40330000	40330000	40330000	
1274	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25480000	25480000	25480000	
1275	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21710000	21710000	21710000	
1276	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23270000	23270000	23270000	
1277	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26840000	26840000	26840000	
1278	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24420000	24420000	24420000	
1279	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14479000	14479000	14479000	
1280	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanezuneiswaban Kepala Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	185489000	185489000	185489000	
1281	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	2640150000	2640150000	2640150000	
1282	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16063952	16063952	16063952	
1283	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3940000	3940000	3940000	
1284	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	2241210472	2241210472	2241210472	
1285	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1443774000	1443774000	1443774000	
1286	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8650000	8650000	8650000	
1287	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	5644560696	5644560696	5644560696	
1288	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17660000	17660000	17660000	
1289	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	1252093000	1252093000	1252093000	
1290	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4749628	4749628	4749628	
1291	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	94115000	94115000	94115000	
1292	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	267971000	267971000	267971000	
1293	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6054700	6054700	6054700	
1294	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13225000	13225000	13225000	
1295	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5041000	5041000	5041000	
1296	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7785000	7785000	7785000	
1297	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18890000	18890000	18890000	
1298	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5462708369	5462708369	5462708369	
1299	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	37412364	37412364	37412364	
1300	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7620000	7620000	7620000	
1301	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5382000	5382000	5382000	
1302	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02

1311	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		
1312	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	365522000	365522000	365522000	Infrastruktur dan Sanitasi
1313	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	78677988	78677988	78677988	
1314	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	108850000	108850000	108850000	
1315	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	78850000	78850000	78850000	
1316	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)	154463000	154463000	154463000	
1317	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10035000	10035000	10035000	
1318	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		
1319	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1553685836	1553685836	1553685836	
1320	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	315000000	315000000	315000000	
1321	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	109773000	109773000	109773000	Infrastruktur dan Sanitasi
1322	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	163059000	163059000	163059000	
1323	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	146500000	146500000	146500000	
1324	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	97211100	97211100	97211100	Infrastruktur dan Sanitasi
1325	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12580000	12580000	12580000	
1326	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	374150000	374150000	374150000	
1327	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2648498500	2648498500	2648498500	
1328	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	295500000	295500000	295500000	
1329	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50325000	50325000	50325000	
1330	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		
1331	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26863856900	26863856900	26863856900	
1332	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15450000	15450000	15450000	
1333	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		
1334	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11266000	11266000	11266000	
1335	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	190714768	190714768	190714768	
1336	2025	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	213725000	213725000	213725000	
1337	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	547946000	547946000	547946000	
1338	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	279226548	279226548	279226548	
1339	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19142000	19142000	19142000	
1340	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	77900400	77900400	77900400	
1341	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	79654000	79654000	79654000	
1342	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	361868300	361868300	361868300	
1343	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	123480800	123480800	123480800	
1344	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	52818692	52818692	52818692	
1345	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	118453750	118453750	118453750	
1346	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	76656000	76656000	76656000	
1347	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29201000	29201000	29201000	
1348	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32981000	32981000	32981000	
1349	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	38478000	38478000	38478000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1350	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35348000	35348000	35348000	
1351	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	234420100	234420100	234420100	
1352	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	64299000	64299000	64299000	
1353	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	77699000	77699000	77699000	
1354	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	45684800	45684800	45684800	
1355	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	71694700	71694700	71694700	
1356	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	314062000	314062000	314062000	
1357	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	289256600	289256600	289256600	
1358	2025

1360	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	300000000	300000000	300000000	
1361	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	77969700	77969700	77969700	
1362	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14868350	14868350	14868350	
1363	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7906500	7906500	7906500	
1364	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15712156	15712156	15712156	
1365	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5283455971	5283455971	5283455971	
1366	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11628000	11628000	11628000	
1367	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11375400	11375400	11375400	
1368	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9999576	9999576	9999576	
1369	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	
1370	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24420000	24420000	24420000	
1371	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	
1372	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
1373	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18951918	18951918	18951918	
1374	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	41336955	41336955	41336955	
1375	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36015650	36015650	36015650	
1376	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	76121896	76121896	76121896	
1377	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6000000	6000000	6000000	
1378	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29999464	29999464	29999464	
1379	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	399685000	399685000	399685000	
1380	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21950450	21950450	21950450	
1381	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	178172000	178172000	178172000	
1382	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21056700	21056700	21056700	
1383	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36186000	36186000	36186000	
1384	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	350038500	350038500	350038500	
1385	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19092000	19092000	19092000	
1386	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3150000	3150000	3150000	
1387	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	88800000	88800000	88800000	
1388	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	262746000	262746000	262746000	
1389	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	45010000	45010000	45010000	
1390	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	74250000	74250000	74250000	
1391	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	31524000	31524000	31524000	
1392	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19500000	19500000	19500000	
1393	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penegakan Peraturan	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	264770951	264770951	264770951	
1394	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penegakan Peraturan	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	65355470	65355470	65355470	
1395	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	146348000	146348000	146348000	
1396	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	79680000	79680000	79680000	
1397	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	137130000	137130000	137130000	
1398	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	217613940	217613940	217613940	
1399	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	135073320	135073320	135073320	
1400	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	169043718	169043718	169043718	
1401	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	186479820	186479820	186479820	
1402	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	97963505	97963505	97963505	
1403	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	86451155	86451155	86451155	
1404	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	125309000	125309000	125309000	
1405	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	113310000	113310000	113310000	
1406	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	279293000	279293000	279293000	
1407	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	185280000	185280000	185280000	
1408	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	190000000	190000000	190000000	
1409	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	103194000	103194000	103194000	
1410	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan

1415	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	71308000	71308000	71308000	
1416	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	80111000	80111000	80111000	
1417	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	182994500	182994500	182994500	
1418	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17600000	17600000	17600000	
1419	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16940000	16940000	16940000	
1420	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16940000	16940000	16940000	
1421	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16940000	16940000	16940000	
1422	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	95215600	95215600	95215600	
1423	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6059811090	6059811090	6059811090	
1424	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16940000	16940000	16940000	
1425	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4556602370	4556602370	4556602370	
1426	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16940000	16940000	16940000	
1427	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14655000	14655000	14655000	
1428	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14477000	14477000	14477000	
1429	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16909300	16909300	16909300	
1430	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	536125500	536125500	536125500	
1431	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	174226024	174226024	174226024	
1432	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	78411500	78411500	78411500	
1433	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	313437500	313437500	313437500	
1434	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75000000	75000000	75000000	
1435	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	89339000	89339000	89339000	
1436	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11800000	11800000	11800000	
1437	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	365727848	365727848	365727848	
1438	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32050000	32050000	32050000	
1439	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	868932000	868932000	868932000	
1440	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	44753900	44753900	44753900	
1441	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	38267500	38267500	38267500	
1442	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21960000	21960000	21960000	
1443	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	45000000	45000000	45000000	
1444	2025	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18150000	18150000	18150000	
1445	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	59761600	59761600	59761600	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1446	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	59051200	59051200	59051200	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1447	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	266053400	266053400	266053400	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1448	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	89540250	89540250	89540250	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1449	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	38625284	38625284	38625284	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1450	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	42205748	42205748	42205748	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1451	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	616364928	616364928	616364928	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1452	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	679200506	679200506	679200506	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1453	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	393144300	393144300	393144300	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1454	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	217591566	217591566	217591566	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1455	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	123661700	123661700	123661700	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1456	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.4.01,1.1.03.02,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	240277220	240277220	240277220	
1457	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggunajawaban Sub Kegiatan	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	170091208	170091208	170091208	
1458	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	230079368	230079368	230079368	
1459	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1.4.01,1.1.03.02,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	51146200	51146200	51146200	
1460	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1.4.01,1.1.03.02,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	68692000	68692000	68692000	
1461	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksan

1462	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1.4.01,1.1.03.02,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	144498204	144498204	144498204	
1463	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1.4.01,1.1.03.02,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	77213402	77213402	77213402	
1464	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.4.01,1.1.03.02,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	184650898	184650898	184650898	
1465	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1.4.01,1.1.03.02,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	31358600	31358600	31358600	
1466	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1.4.01,1.1.03.02,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	196616750	196616750	196616750	
1467	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1.4.01,1.1.03.02	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	98966000	98966000	98966000	
1468	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2748682300	2748682300	2748682300	
1469	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,57124E+11	4,57124E+11	4,57124E+11	
1470	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6009094550	6009094550	6009094550	
1471	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.1.01,1.1.02.01,1.2.01.08	Pajak Daerah,Retribusi Jasa Umum,Dana Alokasi Umum (DAU)	9695459000	9695459000	9695459000	
1472	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	115240742	115240742	115240742	
1473	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	99997680	99997680	99997680	
1474	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)	64750000	64750000	64750000	
1475	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	176451000	176451000	176451000	
1476	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	66966050	66966050	66966050	
1477	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	92522950	92522950	92522950	
1478	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	64335900	64335900	64335900	
1479	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	66668800	66668800	66668800	
1480	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7069177872	7069177872	7069177872	
1481	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	222672850	222672850	222672850	
1482	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)	35233990	35233990	35233990	
1483	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20999900	20999900	20999900	
1484	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15699850	15699850	15699850	
1485	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	441175660	441175660	441175660	
1486	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	82750000	82750000	82750000	
1487	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	119872000	119872000	119872000	
1488	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	52190400	52190400	52190400	
1489	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	173128025	173128025	173128025	
1490	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	44085000	44085000	44085000	
1491	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	272026500	272026500	272026500	
1492	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	126352000	126352000	126352000	
1493	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	42735000	42735000	42735000	
1494	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	562800000	562800000	562800000	
1495	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	387450000	387450000	387450000	
1496	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	515549200	515549200	515549200	
1497	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	15200000	15200000	15200000	
1498	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.1.03.02,1.2.01.08	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD,Dana Alokasi Umum (DAU)	180152500	180152500	180152500	
1499	2025	S	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02.4.01.2.16.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	50000000	50000000	50000000	

1500	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6430000	6430000	6430000	
1501	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	736260000	736260000	736260000	
1502	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6370000	6370000	6370000	
1503	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	27117000	27117000	27117000	Infrastruktur dan Sanitasi
1504	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)	1400000000	1400000000	1400000000	
1505	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9368000	9368000	9368000	
1506	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	92941800	92941800	92941800	
1507	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75999000	75999000	75999000	
1508	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	192998000	192998000	192998000	
1509	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	357422000	357422000	357422000	
1510	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	73527000	73527000	73527000	
1511	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11095000	11095000	11095000	
1512	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Perawai	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)	64175760	64175760	64175760	
1513	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4150000	4150000	4150000	
1514	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34414000	34414000	34414000	
1515	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2506800	2506800	2506800	
1516	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3000000	3000000	3000000	
1517	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3000000	3000000	3000000	
1518	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5740249644	5740249644	5740249644	
1519	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3000000	3000000	3000000	Infrastruktur dan Sanitasi
1520	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4500000	4500000	4500000	
1521	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3000000	3000000	3000000	
1522	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20979000	20979000	20979000	
1523	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)	57124000	57124000	57124000	
1524	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6997000	6997000	6997000	
1525	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)	89469000	89469000	89469000	
1526	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2990000	2990000	2990000	
1527	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	62845200	62845200	62845200	
1528	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	56230944	56230944	56230944	
1529	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
1530	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)	55411000	55411000	55411000	
1531	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10212000	10212000	10212000	
1532	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	48612000	48612000	48612000	
1533	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
1534	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)	35076000	35076000	35076000	
1535	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3994000	3994000	3994000	
1536	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	137760000	137760000	137760000	
1537	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	202704400	202704400	202704400	
1538	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30658000	30658000	30658000	
1539	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20037500	20037500	20037500	Infrastruktur dan Sanitasi
1540	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	37086000	37086000	37086000	
1541	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1432916900	1432916900	1432916900	
1542	2025	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25090000	25090000	25090000	Infrastruktur dan Sanitasi,Optimalisasi penanganan penpendalian inflasi
1543	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24289800	24289800	24289800	Infrastruktur dan Sanitasi
1544	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15706000	15706000	15706000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1545	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25180000	25180000	25180000	Infrastruktur dan Sanitasi
1546	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34000000	34000000	34000000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1547	2025	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.02	PROGRA

1556	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9859000	9859000	9859000	Infrastruktur dan Sanitasi
1557	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13529000	13529000	13529000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1558	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	27391500	27391500	27391500	Infrastruktur dan Sanitasi
1559	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20175000	20175000	20175000	Infrastruktur dan Sanitasi
1560	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7063000	7063000	7063000	Infrastruktur dan Sanitasi
1561	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	127151400	127151400	127151400	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1562	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6660000	6660000	6660000	
1563	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21090000	21090000	21090000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1564	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1565	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	31680000	31680000	31680000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1566	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	120198000	120198000	120198000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1567	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	30650000	30650000	30650000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1568	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4950000	4950000	4950000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1569	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06.1.03.5.01.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100000000	100000000	100000000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1570	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	119140000	119140000	119140000	
1571	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	290565600	290565600	290565600	
1572	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	85295000	85295000	85295000	
1573	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100375000	100375000	100375000	
1574	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	294486250	294486250	294486250	
1575	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	300404802	300404802	300404802	
1576	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	27499000	27499000	27499000	
1577	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	405825154	405825154	405825154	
1578	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Penyelenggaraan	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	235690000	235690000	235690000	
1579	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	107084300	107084300	107084300	
1580	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40741400	40741400	40741400	
1581	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32200050	32200050	32200050	
1582	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7512700	7512700	7512700	
1583	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7500100	7500100	7500100	
1584	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	70217250	70217250	70217250	
1585	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11652201028	11652201028	11652201028	
1586	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15338000	15338000	15338000	
1587	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7500000	7500000	7500000	
1588	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7499800	7499800	7499800	
1589	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5000000	5000000	5000000	
1590	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	94687000	94687000	94687000	
1591	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10008870	10008870	10008870	
1592	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33575280	33575280	33575280	
1593	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10001100	10001100	10001100	
1594	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	149577725	149577725	149577725	
1595	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32000190	32000190	32000190	
1596	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2640000	2640000	2640000	
1597	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	280598000	280598000	280598000	
1598	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
1599	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	74592000	74592000	74592000	
1600	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100010000	100010000	100010000	
1601	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150000000	150000000	150000000	
1602	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	
1603	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9000075	9000075	9000075	
1604	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	229950000	229950000	229950000	
1605	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	113526000	113526000	113526000	
1606	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	97172200	97172200	97172200	
1607	2025	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6

1612	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4379000	4379000	4379000	
1613	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	900000	900000	900000	
1614	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2321000	2321000	2321000	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Kabupaten
1615	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2250000	2250000	2250000	
1616	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4795000	4795000	4795000	
1617	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
1618	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
1619	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0	0	0	
1620	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25451300	25451300	25451300	
1621	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8650000	8650000	8650000	
1622	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7000000	7000000	7000000	
1623	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3600000	3600000	3600000	
1624	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2320000	2320000	2320000	PEMENUHAN SPM
1625	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2260000	2260000	2260000	
1626	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		PEMENUHAN SPM
1627	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33000000	33000000	33000000	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1628	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18500000	18500000	18500000	
1629	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1050000	1050000	1050000	
1630	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2910000	2910000	2910000	
1631	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
1632	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
1633	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	450000	450000	450000	
1634	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
1635	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4535000	4535000	4535000	
1636	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4790000	4790000	4790000	
1637	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0005	Kelurahan Ladang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10926000	10926000	10926000	
1638	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2800000	2800000	2800000	
1639	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3200000	3200000	3200000	PENGENDALIAN INFLASI
1640	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3500000	3500000	3500000	
1641	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5895000	5895000	5895000	
1642	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7020600	7020600	7020600	
1643	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7551000	7551000	7551000	
1644	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3750000	3750000	3750000	
1645	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5800000	5800000	5800000	
1646	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4055500	4055500	4055500	
1647	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4450000	4450000	4450000	
1648	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5476200	5476200	5476200	
1649	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		

1650	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5250400	5250400	5250400	
1651	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2590200	2590200	2590200	
1652	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	151438700	151438700	151438700	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1653	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	168311200	168311200	168311200	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1654	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	190930000	190930000	190930000	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1655	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	180000400	180000400	180000400	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1656	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	90000300	90000300	90000300	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1657	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0005	Kelurahan Ladang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	200620000	200620000	200620000	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1658	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.4.01,2.2.01.08.02.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	270976970	270976970	270976970	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1659	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	150000000	150000000	150000000	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1660	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	188000000	188000000	188000000	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1661	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	187395500	187395500	187395500	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1662	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	177929400	177929400	177929400	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1663	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	180311200	180311200	180311200	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1664	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	194000000	194000000	194000000	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1665	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	143506600	143506600	143506600	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1666	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	184000000	184000000	184000000	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1667	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	163687300	163687300	163687300	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR GUNA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1668	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	22713070	22713070	22713070	
1669	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	36561300	36561300	36561300	PEMENUHAN SPM
1670	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	25930000	25930000	25930000	
1671	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	21070000	21070000	21070000	
1672	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	19999600	19999600	19999600	
1673	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	121999700	121999700	121999700	
1674	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0005	Kelurahan Ladang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	11380000	11380000	11380000	
1675	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	19688800	19688800	19688800	
1676	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	38000000	38000000	38000000	
1677	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15950000	15950000	15950000	
1678	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	22070600	22070600	22070600	
1679	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	12604500	12604500	12604500	
1680	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	68493400	68493400	68493400	
1681	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	16000000	16000000	16000000	
1682	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	19688800	19688800	19688800	
1683	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	36312700	36312700	36312700	
1684	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6000000	6000000	6000000	
1685	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6990000	6990000	6990000	
1686	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19999770	19999770	19999770	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
1687	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		PEMENUHAN SPM
1688	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
1689	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neeara Kesatuan Reoublik Indonesia	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14999300	14999300	14999300	
1690	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12000000	12000000	12000000	
1691	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11250000	11250000	11250000	
1692	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0	0	0	
1693	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25586500	25586500	25586500	
1694	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3248650	3248650	3248650	
1695	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5099600	5099600	5099600	
1696	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16965859402	16965859402	16965859402	
1697	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11203000	11203000	11203000	
1698	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3948000	3948000	3948000	

1699	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyuluran/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3948000	3948000	3948000	
1700	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
1701	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2112000	2112000	2112000	
1702	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		
1703	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5500000	5500000	5500000	
1704	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8000000	8000000	8000000	
1705	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5500000	5500000	5500000	
1706	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	22533000	22533000	22533000	
1707	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3496500	3496500	3496500	PEMENUHAN SPM
1708	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6660000	6660000	6660000	
1709	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8325000	8325000	8325000	
1710	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8325000	8325000	8325000	
1711	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9990000	9990000	9990000	
1712	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9324000	9324000	9324000	
1713	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8547000	8547000	8547000	
1714	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6660000	6660000	6660000	
1715	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11250000	11250000	11250000	
1716	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0005	Kelurahan Ladang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8658000	8658000	8658000	
1717	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	22804000	22804000	22804000	
1718	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
1719	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funesi			0	0		
1720	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6000000	6000000	6000000	
1721	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7996995	7996995	7996995	
1722	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2498388	2498388	2498388	
1723	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2715504	2715504	2715504	
1724	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10054000	10054000	10054000	
1725	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	58912830	58912830	58912830	
1726	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16368060	16368060	16368060	PEMENUHAN SPM
1727	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15173500	15173500	15173500	
1728	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14637570	14637570	14637570	
1729	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12893760	12893760	12893760	
1730	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11063500	11063500	11063500	
1731	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16170250	16170250	16170250	
1732	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16479060	16479060	16479060	
1733	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0005	Kelurahan Ladang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	31701350	31701350	31701350	
1734	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14167460	14167460	14167460	
1735	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13401000	13401000	13401000	
1736	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12141180	12141180	12141180	
1737	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13482040	13482040	13482040	
1738	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7376640	7376640	7376640	
1739	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16847580	16847580	16847580	
1740	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12767000	12767000	12767000	
1741	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11734298	11734298	11734298	
1742	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1626000	1626000	1626000	
1743	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2018000	2018000	2018000	
1744	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3820065	3820065	3820065	
1745	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3051390	3051390	3051390	
1746	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
1747	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1417000	1417000	1417000	
1748	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2207790	2207790	2207790	
1749	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	90288000	90288000	90288000	
1750	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3720000	3720000	3720000	
1751	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8986560	8986560	8986560	
1752	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7326000	7326000	7326000	
1753	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4884000	4884000	4884000	
1754	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5274720	5274720	5274720	
1755	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8791200	8791200	8791200	
1756	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0005	Kelurahan Ladang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7032960	7032960	7032960	
1757	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2

1758	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6251520	6251520	6251520	
1759	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3996000	3996000	3996000	
1760	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1350000	1350000	1350000	
1761	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8991000	8991000	8991000	
1762	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21002070	21002070	21002070	
1763	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3764800	3764800	3764800	
1764	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3246444	3246444	3246444	PEMENUHAN SPM
1765	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3700400	3700400	3700400	
1766	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7855200	7855200	7855200	
1767	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3006990	3006990	3006990	
1768	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7204566	7204566	7204566	
1769	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2549600	2549600	2549600	
1770	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4001600	4001600	4001600	
1771	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2220000	2220000	2220000	
1772	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	825600	825600	825600	
1773	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1155600	1155600	1155600	
1774	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4465500	4465500	4465500	
1775	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	3005400	3005400	3005400	
1776	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1400000	1400000	1400000	
1777	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14721150	14721150	14721150	
1778	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35984000	35984000	35984000	
1779	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25491600	25491600	25491600	PEMENUHAN SPM
1780	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5240000	5240000	5240000	
1781	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	12996000	12996000	12996000	
1782	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0005	Kelurahan Ladang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4386000	4386000	4386000	
1783	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12949950	12949950	12949950	
1784	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	16842000	16842000	16842000	
1785	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	14022000	14022000	14022000	
1786	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	19440000	19440000	19440000	
1787	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9100000	9100000	9100000	
1788	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
1789	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08,2.2.01.08.02.0001	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	28680000	28680000	28680000	
1790	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	6662000	6662000	6662000	
1791	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01,1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,Dana Alokasi Umum (DAU)	5400000	5400000	5400000	
1792	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19898000	19898000	19898000	
1793	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4500000	4500000	4500000	
1794	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8010000	8010000	8010000	
1795	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9324000	9324000	9324000	
1796	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6218000	6218000	6218000	
1797	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12987000	12987000	12987000	
1798	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11655000	11655000	11655000	
1799	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5672100	5672100	5672100	
1800	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6216000	6216000	6216000	
1801	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50505000	50505000	50505000	
1802	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6304800	6304800	6304800	PEMENUHAN SPM
1803	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10434000	10434000	10434000	
1804	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17102325	17102325	17102325	
1805	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5772000	5772000	5772000	
1806	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21098325	21098325	21098325	
1807	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17427000	17427000	17427000	
1808	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18870000	18870000	18870000	
1809	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18093000	18093000	18093000	
1810	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12876000	12876000	12876000	
1811	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18000000	18000000	18000000	
1812	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10976000	10976000	10976000	
1813	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4884000	4884000	4884000	
1814	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

1820	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000000	2000000	2000000	
1821	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1200000	1200000	1200000	
1822	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1020000	1020000	1020000	
1823	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
1824	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000000	2000000	2000000	
1825	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1000000	1000000	1000000	
1826	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1600000	1600000	1600000	
1827	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0005	Kelurahan Ladang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3330000	3330000	3330000	
1828	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	800000	800000	800000	
1829	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000000	2000000	2000000	
1830	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
1831	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
1832	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11580000	11580000	11580000	
1833	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	37680000	37680000	37680000	
1834	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3654042	3654042	3654042	PEMENUHAN SPM
1835	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12600000	12600000	12600000	
1836	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11088000	11088000	11088000	
1837	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14399700	14399700	14399700	
1838	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12000000	12000000	12000000	
1839	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15119600	15119600	15119600	
1840	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7200000	7200000	7200000	
1841	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8400000	8400000	8400000	
1842	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8280000	8280000	8280000	
1843	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7800000	7800000	7800000	
1844	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0005	Kelurahan Ladang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	22900000	22900000	22900000	
1845	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10800000	10800000	10800000	
1846	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14400000	14400000	14400000	
1847	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16025260	16025260	16025260	
1848	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10250000	10250000	10250000	
1849	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4803000	4803000	4803000	PEMENUHAN SPM
1850	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	511870800	511870800	511870800	
1851	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18122400	18122400	18122400	PEMENUHAN SPM
1852	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32143200	32143200	32143200	
1853	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0016	Kelurahan Alai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16071600	16071600	16071600	
1854	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50265600	50265600	50265600	
1855	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36244800	36244800	36244800	
1856	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	52316400	52316400	52316400	
1857	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32143200	32143200	32143200	
1858	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16071600	16071600	16071600	
1859	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36244800	36244800	36244800	
1860	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	52316400	52316400	52316400	
1861	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0005	Kelurahan Ladang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49239600	49239600	49239600	
1862	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	48214800	48214800	48214800	
1863	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34194000	34194000	34194000	
1864	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16071600	16071600	16071600	
1865	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	52316400	52316400	52316400	
1866	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16071600	16071600	16071600	
1867	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4920000	4920000	4920000	
1868	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0015	Kelurahan Batu Lalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10590000	10590000	10590000	PEMENUHAN SPM
1869	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	800000	800000	800000	
1870	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4400000	4400000	4400000	
1871	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3420000	3420000	3420000	
1872	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0002	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	600000	600000	600000	
1873	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0011	Kelurahan Sengkuang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	750000	750000	750000	

1874	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0005	Kelurahan Ladang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1800000	1800000	1800000	
1875	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18500000	18500000	18500000	
1876	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4700000	4700000	4700000	
1877	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	600000	600000	600000	
1878	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0009	Kelurahan Rawa Mambok	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3775000	3775000	3775000	
1879	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2775000	2775000	2775000	
1880	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3560000	3560000	3560000	
1881	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1600000	1600000	1600000	
1882	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3108000	3108000	3108000	
1883	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0012	Kelurahan Mengkurai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6410000	6410000	6410000	
1884	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7790000	7790000	7790000	
1885	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0008	Kelurahan Akcaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1380000	1380000	1380000	
1886	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0001	Kelurahan Tanjung Puri	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1830000	1830000	1830000	
1887	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0004	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4650000	4650000	4650000	
1888	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0003	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1420000	1420000	1420000	
1889	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2840000	2840000	2840000	
1890	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0010	Kelurahan Mekar Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2840000	2840000	2840000	
1891	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4950000	4950000	4950000	
1892	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0013	Kelurahan Kedabang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4300000	4300000	4300000	
1893	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0014	Kelurahan Ulak Jaya	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
1894	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100000000	100000000	100000000	
1895	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3660000	3660000	3660000	
1896	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0007	Kelurahan Menyumbung Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3050000	3050000	3050000	
1897	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.01.0000	Kecamatan Sintang	7.01.2.13.1.05.01.0006	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1830000	1830000	1830000	
1898	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10145400	10145400	10145400	
1899	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14319000	14319000	14319000	
1900	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	56934400	56934400	56934400	
1901	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20219640	20219640	20219640	
1902	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neeara Kesatuan Reoublik Indonesia	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23421000	23421000	23421000	
1903	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33022500	33022500	33022500	
1904	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2058055660	2058055660	2058055660	
1905	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20643800	20643800	20643800	
1906	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14985000	14985000	14985000	
1907	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	377400	377400	377400	
1908	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34000000	34000000	34000000	
1909	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5390604	5390604	5390604	
1910	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15712050	15712050	15712050	
1911	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4966900	4966900	4966900	
1912	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14010420	14010420	14010420	
1913	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12217992	12217992	12217992	
1914	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	152251000	152251000	152251000	
1915	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	143948900	143948900	143948900	
1916	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6010000	6010000	6010000	
1917	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2913750	2913750	2913750	
1918	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2220000	2220000	2220000	
1919	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7800000	7800000	7800000	
1920	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	116602800	116602800	116602800	

1921	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	53291100	53291100	53291100	
1922	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01.2.13.1.05.02.0000	Kecamatan Ambalau	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18481500	18481500	18481500	
1923	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10330000	10330000	10330000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1924	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12005000	12005000	12005000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1925	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9225000	9225000	9225000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1926	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7877000	7877000	7877000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1927	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
1928	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10555200	10555200	10555200	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1929	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
1930	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1931	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14100000	14100000	14100000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1932	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17000000	17000000	17000000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1933	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15690000	15690000	15690000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1934	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11669000	11669000	11669000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1935	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7421000	7421000	7421000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1936	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5323000	5323000	5323000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1937	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2739349613	2739349613	2739349613	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1938	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyulian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1800000	1800000	1800000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1939	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3874000	3874000	3874000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1940	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16650000	16650000	16650000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1941	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12300000	12300000	12300000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1942	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7275000	7275000	7275000	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Kabupaten
1943	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1405000	1405000	1405000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1944	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33548500	33548500	33548500	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1945	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2280976	2280976	2280976	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1946	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	54583500	54583500	54583500	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1947	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5455200	5455200	5455200	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1948	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	78380000	78380000	78380000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1949	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2997000	2997000	2997000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1950	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	48951000	48951000	48951000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1951	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8180000	8180000	8180000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1952	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1953	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15959000	15959000	15959000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1954	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	71983200	71983200	71983200	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1955	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17000000	17000000	17000000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1956	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13800000	13800000	13800000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1957	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01.2.13.1.05.03.0000	Kecamatan Kelam Permai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5950000	5950000	5950000	PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
1958	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7540000	7540000	7540000	
1959	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	41444000	41444000	41444000	
1960	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10710000	10710000	10710000	
1961	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6110000	6110000	6110000	
1962	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8176000	8176000	8176000	
1963	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25793000	25793000	25793000	

1964	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20115000	20115000	20115000	
1965	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
1966	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9180000	9180000	9180000	
1967	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29935000	29935000	29935000	
1968	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3830000	3830000	3830000	
1969	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20230000	20230000	20230000	
1970	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10385000	10385000	10385000	
1971	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1972786056	1972786056	1972786056	
1972	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6048000	6048000	6048000	
1973	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
1974	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	42822760	42822760	42822760	
1975	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6547500	6547500	6547500	
1976	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	51619500	51619500	51619500	
1977	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9600800	9600800	9600800	
1978	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17487000	17487000	17487000	
1979	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5150000	5150000	5150000	
1980	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15600000	15600000	15600000	
1981	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35598000	35598000	35598000	
1982	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	65830800	65830800	65830800	
1983	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01.2.13.1.05.04.0000	Kecamatan Binjai Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26900000	26900000	26900000	
1984	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15806000	15806000	15806000	
1985	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18330000	18330000	18330000	
1986	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2923180	2923180	2923180	
1987	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11284600	11284600	11284600	
1988	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3569080	3569080	3569080	
1989	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6694380	6694380	6694380	
1990	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5244000	5244000	5244000	
1991	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9156900	9156900	9156900	
1992	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5975400	5975400	5975400	
1993	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30500000	30500000	30500000	
1994	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29755400	29755400	29755400	
1995	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
1996	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2442000	2442000	2442000	
1997	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29064000	29064000	29064000	
1998	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10737000	10737000	10737000	
1999	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8390400	8390400	8390400	
2000	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0		
2001	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15290200	15290200	15290200	
2002	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2281617825	2281617825	2281617825	
2003	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8730000	8730000	8730000	
2004	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4431000	4431000	4431000	
2005	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4992500	4992500	4992500	
2006	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34965000	34965000	34965000	
2007	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5202400	5202400	5202400	
2008	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32052200	32052200	32052200	

2009	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19800000	19800000	19800000	
2010	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	43233224	43233224	43233224	
2011	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2498244	2498244	2498244	
2012	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	85930000	85930000	85930000	
2013	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26362500	26362500	26362500	
2014	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
2015	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35400000	35400000	35400000	
2016	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13623000	13623000	13623000	
2017	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32143200	32143200	32143200	
2018	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01.2.13.1.05.05.0000	Kecamatan Tempunak	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34800000	34800000	34800000	
2019	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11512750	11512750	11512750	
2020	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10205000	10205000	10205000	
2021	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12920000	12920000	12920000	
2022	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39557500	39557500	39557500	
2023	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39410000	39410000	39410000	
2024	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13350000	13350000	13350000	
2025	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20014000	20014000	20014000	
2026	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30435000	30435000	30435000	
2027	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9440000	9440000	9440000	
2028	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10830000	10830000	10830000	
2029	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2283885824	2283885824	2283885824	
2030	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6930000	6930000	6930000	
2031	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8850000	8850000	8850000	
2032	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8100000	8100000	8100000	
2033	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39088000	39088000	39088000	
2034	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	38334000	38334000	38334000	
2035	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9350000	9350000	9350000	
2036	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	60687000	60687000	60687000	
2037	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	43197500	43197500	43197500	
2038	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000000	2000000	2000000	
2039	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19200000	19200000	19200000	
2040	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	52316400	52316400	52316400	
2041	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46110000	46110000	46110000	
2042	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01.2.13.1.05.06.0000	Kecamatan Dedai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8560000	8560000	8560000	
2043	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2850000	2850000	2850000	
2044	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2530000	2530000	2530000	
2045	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17700000	17700000	17700000	
2046	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3425000	3425000	3425000	
2047	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3865000	3865000	3865000	
2048	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3025000	3025000	3025000	
2049	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4295000	4295000	4295000	
2050	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3220000	3220000	3220000	
2051	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3650000	3650000	3650000	

2052	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3745000	3745000	3745000	
2053	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3155000	3155000	3155000	
2054	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4180000	4180000	4180000	
2055	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
2056	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	38065000	38065000	38065000	
2057	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24475000	24475000	24475000	
2058	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13710000	13710000	13710000	
2059	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3290000	3290000	3290000	
2060	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3655000	3655000	3655000	
2061	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2884965258	2884965258	2884965258	
2062	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11130000	11130000	11130000	
2063	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15000000	15000000	15000000	
2064	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12152000	12152000	12152000	
2065	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5365000	5365000	5365000	
2066	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	47159000	47159000	47159000	
2067	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7835000	7835000	7835000	
2068	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	53917250	53917250	53917250	
2069	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9681400	9681400	9681400	
2070	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	82546000	82546000	82546000	
2071	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18970000	18970000	18970000	
2072	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5600000	5600000	5600000	
2073	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	27000000	27000000	27000000	
2074	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4500000	4500000	4500000	
2075	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1200000	1200000	1200000	
2076	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	27000000	27000000	27000000	
2077	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	51810000	51810000	51810000	
2078	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	84200000	84200000	84200000	
2079	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15940000	15940000	15940000	
2080	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01.2.13.1.05.07.0000	Kecamatan Sepauk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16650000	16650000	16650000	
2081	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9202500	9202500	9202500	
2082	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
2083	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18316500	18316500	18316500	
2084	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
2085	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
2086	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
2087	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11240000	11240000	11240000	
2088	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36805000	36805000	36805000	
2089	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3123000	3123000	3123000	
2090	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20807000	20807000	20807000	
2091	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	85020450	85020450	85020450	
2092	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25528000	25528000	25528000	
2093	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2045673024	2045673024	2045673024	
2094	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7155000	7155000	7155000	

2095	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18426000	18426000	18426000	
2096	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
2097	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.Dana Alokasi Umum (DAU)	23750500	23750500	23750500	
2098	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1800000	1800000	1800000	
2099	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14698000	14698000	14698000	
2100	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5132400	5132400	5132400	
2101	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4995000	4995000	4995000	
2102	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.01.1.2.01.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.Dana Alokasi Umum (DAU)	113594000	113594000	113594000	
2103	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40045000	40045000	40045000	
2104	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40293000	40293000	40293000	
2105	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1500000	1500000	1500000	
2106	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24291000	24291000	24291000	
2107	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	51810000	51810000	51810000	
2108	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01.2.13.1.05.08.0000	Kecamatan Ketungau Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14420000	14420000	14420000	
2109	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2635000	2635000	2635000	
2110	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	320400	320400	320400	
2111	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6235000	6235000	6235000	
2112	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5088000	5088000	5088000	
2113	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	90000	90000	90000	
2114	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4221000	4221000	4221000	
2115	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	190000	190000	190000	
2116	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9942500	9942500	9942500	
2117	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39190250	39190250	39190250	
2118	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	37258350	37258350	37258350	
2119	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
2120	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	280000	280000	280000	
2121	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14940000	14940000	14940000	
2122	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1859582249	1859582249	1859582249	
2123	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6048000	6048000	6048000	
2124	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	98030000	98030000	98030000	
2125	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3600000	3600000	3600000	
2126	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8720000	8720000	8720000	
2127	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	760000	760000	760000	
2128	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	80000	80000	80000	
2129	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2442000	2442000	2442000	
2130	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1988000	1988000	1988000	
2131	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	81972330	81972330	81972330	
2132	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	65096850	65096850	65096850	
2133	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7225600	7225600	7225600	
2134	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	104270000	104270000	104270000	
2135	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanean	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19236300	19236300	19236300	
2136	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12820500	12820500	12820500	
2137	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000000	2000000	2000000	
2138	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24000000	24000000	24000000	
2139	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	48214800	48214800	48214800	
2140	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01.2.13.1.05.09.0000	Kecamatan Ketungau Tengah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanean	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30500000	30500000	30500000	
2141	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24864000	24864000	24864000	
2142	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13680000	13680000	13680000	
2143	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20004700	20004700	20004700	
2144	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2255952772	2255952772	2255952772	

2145	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyuluan/Verifikasi Keuanaan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	44389740	44389740	44389740	
2146	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19980000	19980000	19980000	
2147	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	134035650	134035650	134035650	
2148	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18081900	18081900	18081900	
2149	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	166596500	166596500	166596500	
2150	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1656000	1656000	1656000	
2151	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	104126400	104126400	104126400	
2152	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	98516200	98516200	98516200	
2153	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01.2.13.1.05.10.0000	Kecamatan Ketungau Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunianz Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	31524000	31524000	31524000	
2154	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenezaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
2155	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11333650	11333650	11333650	
2156	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Peranekat Daerah vang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1221000	1221000	1221000	
2157	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonpemerintan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4884000	4884000	4884000	
2158	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4040000	4040000	4040000	
2159	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tinekat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masvarakat	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnva	20089280	20089280	20089280	
2160	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
2161	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional , dan Nasional	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4884000	4884000	4884000	
2162	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15995000	15995000	15995000	
2163	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6984120	6984120	6984120	
2164	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32597400	32597400	32597400	
2165	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranekat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2838000	2838000	2838000	
2166	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2475232848	2475232848	2475232848	PEMENUHAN SPM
2167	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyuluan/Verifikasi Keuanaan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8730000	8730000	8730000	
2168	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2967500	2967500	2967500	
2169	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23400000	23400000	23400000	
2170	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17532000	17532000	17532000	
2171	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39760200	39760200	39760200	
2172	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	78678750	78678750	78678750	
2173	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29914500	29914500	29914500	
2174	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	125440000	125440000	125440000	
2175	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23676300	23676300	23676300	
2176	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21090000	21090000	21090000	
2177	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26196000	26196000	26196000	
2178	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2500000	2500000	2500000	
2179	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20780000	20780000	20780000	
2180	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	102582000	102582000	102582000	
2181	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01.2.13.1.05.11.0000	Kecamatan Kayan Hilir	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19090000	19090000	19090000	
2182	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	700000	700000	700000	
2183	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10990000	10990000	10990000	
2184	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenezaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10990000	10990000	10990000	
2185	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenezaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34217500	34217500	34217500	
2186	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10930000	10930000	10930000	
2187	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12410000	12410000	12410000	

2188	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	550000	550000	550000	
2189	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.4.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20000000	20000000	20000000	
2190	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8092800	8092800	8092800	
2191	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12725000	12725000	12725000	
2192	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2445132185	2445132185	2445132185	
2193	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	70680000	70680000	70680000	
2194	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34632000	34632000	34632000	
2195	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10169000	10169000	10169000	
2196	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	87676000	87676000	87676000	
2197	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7075000	7075000	7075000	
2198	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49795000	49795000	49795000	
2199	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9500200	9500200	9500200	
2200	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	73070000	73070000	73070000	
2201	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25541100	25541100	25541100	
2202	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16650000	16650000	16650000	
2203	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000000	2000000	2000000	
2204	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8400000	8400000	8400000	
2205	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	118653600	118653600	118653600	
2206	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01.2.13.1.05.12.0000	Kecamatan Kayan Hulu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40280000	40280000	40280000	
2207	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5125000	5125000	5125000	
2208	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penjagaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8854000	8854000	8854000	
2209	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7096000	7096000	7096000	
2210	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12574400	12574400	12574400	
2211	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15910000	15910000	15910000	
2212	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12946000	12946000	12946000	
2213	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23361200	23361200	23361200	
2214	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19950000	19950000	19950000	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
2215	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3137000	3137000	3137000	
2216	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	44122500	44122500	44122500	
2217	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33312000	33312000	33312000	
2218	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13884000	13884000	13884000	
2219	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33102000	33102000	33102000	
2220	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9071200	9071200	9071200	
2221	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7810000	7810000	7810000	
2222	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5070000	5070000	5070000	
2223	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2134177724	2134177724	2134177724	
2224	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyulian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1800000	1800000	1800000	
2225	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9650000	9650000	9650000	
2226	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5530000	5530000	5530000	
2227	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18648000	18648000	18648000	
2228	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4650000	4650000	4650000	
2229	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
2230	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19997250	19997250	19997250	

2231	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5165928	5165928	5165928	
2232	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	43099920	43099920	43099920	
2233	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8613600	8613600	8613600	
2234	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6660000	6660000	6660000	
2235	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	83340000	83340000	83340000	
2236	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36630000	36630000	36630000	
2237	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29650000	29650000	29650000	
2238	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16200000	16200000	16200000	
2239	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	67362000	67362000	67362000	
2240	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15600000	15600000	15600000	
2241	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	31981500	31981500	31981500	
2242	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01.2.13.1.05.13.0000	Kecamatan Serawai	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7820000	7820000	7820000	
2243	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46200000	46200000	46200000	
2244	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5225000	5225000	5225000	
2245	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5325000	5325000	5325000	
2246	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	37889850	37889850	37889850	
2247	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20633030	20633030	20633030	
2248	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
2249	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29697050	29697050	29697050	
2250	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5815000	5815000	5815000	
2251	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	31664100	31664100	31664100	
2252	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
2253	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5600000	5600000	5600000	
2254	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2779790999	2779790999	2779790999	
2255	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6930000	6930000	6930000	
2256	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29656000	29656000	29656000	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Kabupaten
2257	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1588672	1588672	1588672	
2258	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30177822	30177822	30177822	
2259	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5052500	5052500	5052500	
2260	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	37780400	37780400	37780400	
2261	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6970800	6970800	6970800	
2262	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29218000	29218000	29218000	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Kabupaten
2263	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4995000	4995000	4995000	
2264	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26584500	26584500	26584500	
2265	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2840000	2840000	2840000	
2266	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17400000	17400000	17400000	
2267	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4728600	4728600	4728600	
2268	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	84459600	84459600	84459600	
2269	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6100000	6100000	6100000	
2270	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20000000	20000000	20000000	
2271	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16650000	16650000	16650000	
2272	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01.2.13.1.05.14.0000	Kecamatan Sungai Tebelian	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4190250	4190250	4190250	
2273	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	43109744	43109744	43109744	
2274	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	105513072	105513072	105513072	
2275	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	599989450	599989450	599989450	
2276	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24596800	24596800	24596800	

2277	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah.	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1586130000	1586130000	1586130000	
2278	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah.	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29635200	29635200	29635200	
2279	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	27954760	27954760	27954760	
2280	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	28445600	28445600	28445600	
2281	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21809120	21809120	21809120	
2282	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25893228	25893228	25893228	
2283	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23259560	23259560	23259560	
2284	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	446742950	446742950	446742950	
2285	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3318826158	3318826158	3318826158	
2286	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12920000	12920000	12920000	
2287	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	31135500	31135500	31135500	
2288	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35011410	35011410	35011410	
2289	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11054490	11054490	11054490	
2290	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50240000	50240000	50240000	
2291	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19375494	19375494	19375494	
2292	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	91825000	91825000	91825000	
2293	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8156300	8156300	8156300	
2294	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	72150000	72150000	72150000	
2295	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4800000	4800000	4800000	
2296	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21000000	21000000	21000000	
2297	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	191939200	191939200	191939200	
2298	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39960000	39960000	39960000	
2299	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniane Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7203900	7203900	7203900	
2300	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6710000	6710000	6710000	